



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS SOSIAL

T.A 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. LKj Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, merupakan bentuk usaha nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah serta diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2026.

LKj Dinas Sosial Tahun 2025 adalah wujud tanggungjawab pejabat Publik kepada masyarakat mengenai kinerja instansi pemerintah khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo selama 1 (satu) tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Sosial adalah untuk menggambarkan penerapan rencana strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta capaian keberhasilan saat ini, untuk mempercepat peningkatan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Sosial Kab. Yahukimo, kita dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good*

Governance dalam pelayanan publik, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah.

Demikian penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Sosial Tahun 2025 ini, semoga dapat digunakan secara optimal dan konstruktif oleh para pemangku kepentingan/ *Stakeholders* dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah dan senantiasa membawa antusiasme baru dalam peningkatan pelayanan Publik/ fasilitasi masyarakat di masa mendatang.

Sumohai, 25 Februari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	3
1. Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan	7
2. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin	9
3. Keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan	10
4. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan	11
5. Keadaan Pegawai berdasarkan Kelompok Umur	12
D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	13
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. REVIU RENCANA STRATEGIS	24
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	30
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	34
E. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2025	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL	41
1. Sasaran Strategis 1	48
2. Sasaran Strategis 2	67
3. Sasaran Strategis 3	89
4. Sasaran Strategis 4	119
B. REALISASI ANGGARAN DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN	126
BAB IV PENUTUP	133
LAMPIRAN	
• Rencana Strategis (RENSTRA);	

- Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025;



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan 8

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 9

Tabel 1. 3 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan 10

Tabel 1. 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan 11

Tabel 1. 5 Keadaan Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur 12

Tabel 1. 6 Isu Strategis Yang Menjawab Permasalahan 21

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Yang Menjawab Isu Strategis 28

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama 31

Tabel 2. 3 Rencana Strategis Dinas Sosial 33

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahun 2025 34

Tabel 2. 5 Program Dan Anggaran Dinas Sosial 39

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran Strategi Dan Indikator Kinerja Tahun 2025 43

Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Tahun 2025 44

Tabel 3. 3 Hasil Pengukuran Pencapaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 45

Tabel 3. 4 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir jangka menengah 47

Tabel 3. 5 Penyebab Keberhasilan 54

Tabel 3. 6 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis I Indikator Kinerja I 55

Tabel 3. 7 Bahan Kerja Sasaran Strategis I 57

Tabel 3. 8 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo 58

Tabel 3. 9 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis 59

Tabel 3. 10 Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan.....	60
Tabel 3. 11 Penyebab Kegagalan.....	62
Tabel 3. 12 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis I Indikator Kinerja II	63
Tabel 3. 13 Bahan Kerja Sasaran Strategis I Indikator Kinerja II	64
Tabel 3. 14 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo	65
Tabel 3. 15 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis	66
Tabel 3. 16 Penyebab Keberhasilan	69
Tabel 3. 17 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis II Indikator Kinerja I	70
Tabel 3. 18 Bahan Kerja Sasaran Strategis II IK I.....	71
Tabel 3. 19 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo	73
Tabel 3. 20 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis	74
Tabel 3. 21 Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan.....	74
Tabel 3. 22 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis II Indikator Kinerja II.....	77
Tabel 3. 23 Bahan Kerja Sasaran Strategis II IK II	79
Tabel 3. 24 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo	80
Tabel 3. 25 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis	81
Tabel 3. 26 Penyebab Keberhasilan	82
Tabel 3. 27 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis II Indikator Kinerja III	83
Tabel 3. 28 Bahan Kerja Sasaran Strategis II IK III	85
Tabel 3. 29 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo	86
Tabel 3. 30 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis	87
Tabel 3. 31 Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan.....	88
Tabel 3. 32 Penyebab kegagalan dan kendala yang dihadapi	93
Tabel 3. 33 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis III IK I	94

Tabel 3. 34 Bahan Kerja Sasaran Strategis III IK I	96
Tabel 3. 35 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo	97
Tabel 3. 36 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis	98
Tabel 3. 37 Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan.....	99
Tabel 3. 38 Penyebab Kegagalan.....	101
Tabel 3. 39 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis III IK II.....	102
Tabel 3. 40 Bahan Kerja Sasaran Strategis III IK II	104
Tabel 3. 41 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo	105
Tabel 3. 42 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis	106
Tabel 3. 43 Penyebab Kegagalan.....	107
Tabel 3. 44 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis III IK III	108
Tabel 3. 45 Bahan Kerja Sasaran Strategis III IK III	110
Tabel 3. 46 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo	111
Tabel 3. 47 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis	112
Tabel 3. 48 Penyebab Kegagalan.....	113
Tabel 3. 49 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis III IK IV	114
Tabel 3. 50 Bahan Kerja Sasaran Strategis III IK IV	116
Tabel 3. 51 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo	117
Tabel 3. 52 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis	118
Tabel 3. 53 Penyebab Kegagalan.....	122
Tabel 3. 54 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis IV	123
Tabel 3. 55 Bahan Kerja Sasaran Strategis IV	124
Tabel 3. 56 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo	125
Tabel 3. 57 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis	126

Tabel 3. 58 Skala Pengukuran Efektivitas Anggaran.....	127
Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja serta efektifitas anggaran.....	128
Tabel 3. 60 Efektivitas Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025.....	131



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial	5
Gambar 1. 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan	8
Gambar 1. 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Gambar 1. 4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	10
Gambar 1. 5. Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	11
Gambar 1. 6. Keadaan Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur	12
Gambar 2. 1. Sasaran Strategis Yang Menjawab Isu Strategis	29
Gambar 2. 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
Gambar 3. 1. Penanggungjawab Sasaran Strategis I IK I Sesuai Prosedur Kerja	56
Gambar 3. 2. Penanggungjawab Sasaran Strategis I IK II Sesuai Prosedur Kerja	63
Gambar 3. 3. Penanggungjawab Sasaran Strategis II IK I Sesuai Prosedur Kerja	70
Gambar 3. 4. Penanggungjawab Sasaran Strategis II IK II Sesuai Prosedur Kerja	78
Gambar 3. 5. Penanggungjawab Sasaran Strategis III IK I Sesuai Prosedur Kerja	95
Gambar 3. 6. Penanggungjawab Sasaran Strategis III IK II Sesuai Prosedur Kerja ...	103
Gambar 3. 7. Penanggungjawab Sasaran Strategis III IK II Sesuai Prosedur Kerja ...	109
Gambar 3. 8. Penanggungjawab Sasaran Strategis III IK IV Sesuai Prosedur Kerja ..	115
Gambar 3. 9. Penanggungjawab Sasaran Strategis IV Sesuai Prosedur Kerja	123



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2025 menginformasikan tugas dan fungsi serta tujuan, sasaran maupun hasil capaian kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial atas Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang telah di perjanjikan dengan Bupati Yahukimo.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 – 2026, Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo mengemban tugas dalam tujuan “Mengoptimalkan Pelayanan Sosial Masyarakat” dengan 3 (tiga) sasaran yaitu “Optimalnya Pelayanan Terhadap PMKS, Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan KAT, dan Optimalnya Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia”. Untuk menunjang pencapaian sasaran tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan hasil yang diharapkan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, dan rasional yaitu:

1. Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial;
2. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel;
3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS;
4. Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.

4 (empat) Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja di antaranya:



Table i. Capaian Kinerja Sasaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%
		Persentase Tagana aktif	90%	0%
2	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	BB	Belum Dievaluasi
		Persentase menurunnya temuan material	20%	N/A
		Persentase aset kondisi baik	100%	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14%	12%
		Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	25%	0%
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35%	0%
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam ppeningkatan kesejahteraan sosial	85%	0%
4	Meningkatnya hak hidup dasar lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	8 Kota	0 Kota

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan perintah, maka perlu adanya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) untuk mengetahui kemampuan pencapaian visi dan misi dalam rangka membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintah yang berorientasi pada keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai asas-asas umum penyelenggaraan Negara yakni asas akuntabilitas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai tanggungjawab kepada pemberi kebijakan secara periodik, kebijakan ini sebagai pelaksanaan dari TAP MPR RI Nomor XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada publik maka pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong kinerja tersebut, pengukuran kinerja juga sebagai wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu unit organisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 lebih mendekat kepada sistem AKIP setelah melalui perencanaan dalam membandingkan antara perencanaan, realisasi dan sasaran dengan menggunakan indikator *input*, *output*, *outcome* dalam

mencapai target indikator pada hasil. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai informasi atas capaian kinerja instansi atau SKPD.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan:

1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo;
2. Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan:

1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo;
2. Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk merencanakan arah kebijakan strategi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam periode RPJMD 2021-

2026 maka telah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026, dengan maksud untuk menetapkan rencana arah kebijakan serta target yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur.

Dalam melaksanakan RENSTRA tersebut maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagai penjabaran tahunan dari rencana strategis ini. Rencana Kinerja ini merupakan tolok ukur/ target program/ kegiatan yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

C. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Potensi;
 - c. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga.
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan ODH;
 - b. Kepala Seksi Pemakaman.
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Kepala Seksi Pemeliharaan Fakir Miskin, Anak Terlantar dan Lansia;

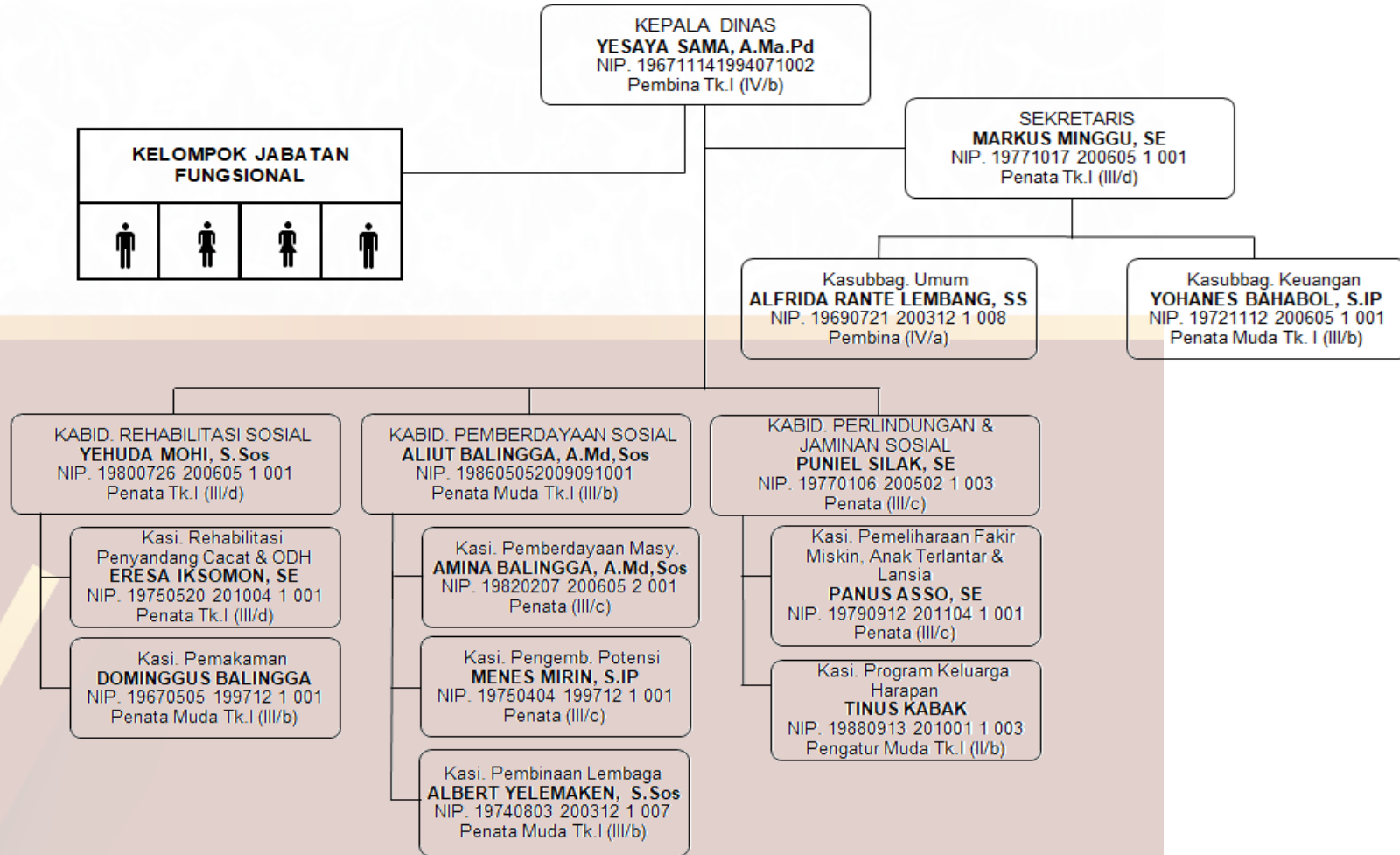
- b. Kepala Seksi Program Keluarga Harapan.
6. UPTD;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut

:



Gambar 1. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial



Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertical sesuai dengan bidangnya, dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
3. Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
5. Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik jika ada penataan Organisasi yang baik pula sesuai dengan peraturan.

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial memiliki Sumber daya manusia yang merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo. Sumber Daya Manusia yang tersedia pada

Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 sebanyak 31 orang Aparatur Sipil Negara, yang dikelompokkan dalam 4 (Empat) keadaan, yaitu:

1. Keadaan pegawai berdasarkan pangkat/ golongan;
2. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin;
3. Keadaan pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan;
4. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan;
5. Keadaan pegawai berdasarkan kelompok umur.

1. Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan

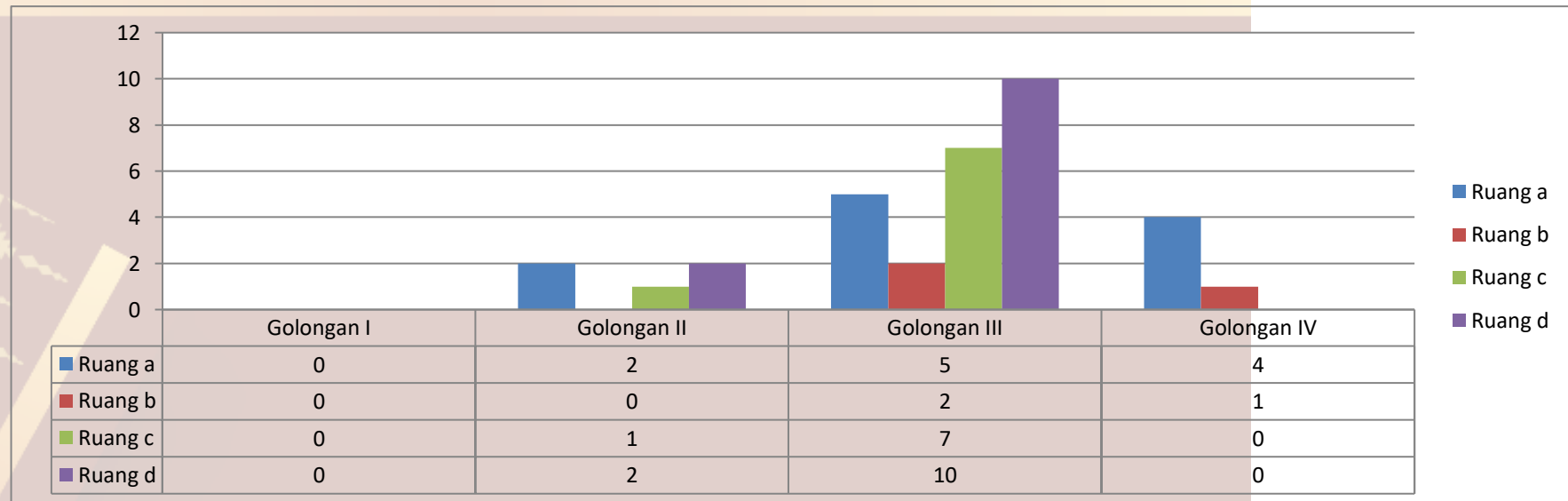
Keadaan pegawai berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 mulai dari pangkat terendah sampai tertinggi, sebagai berikut



Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan

Jumlah Pegawai	Pangkat/ Golongan																			TOTAL JUMLAH			
	I				Jumlah	II				Jumlah	III				Jumlah	IV					Jumlah	PPPK	
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	D		a	b	c	d			V	IX
23	0	0	0	0	0	2	0	1	2	5	5	2	7	10	24	4	1	0	0	5	1	1	36

Gambar 1. 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan



Sumber : Sub Bagian Umum

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Dinas Sosial yang paling banyak adalah golongan III dengan jumlah 24 orang pegawai, diikuti golongan II dan IV masing-masing sebanyak 5 (lima) orang pegawai, golongan V sebanyak 1 (satu) lalu golongan IX sebanyak 1 (satu) orang pegawai dan golongan I tidak ada.

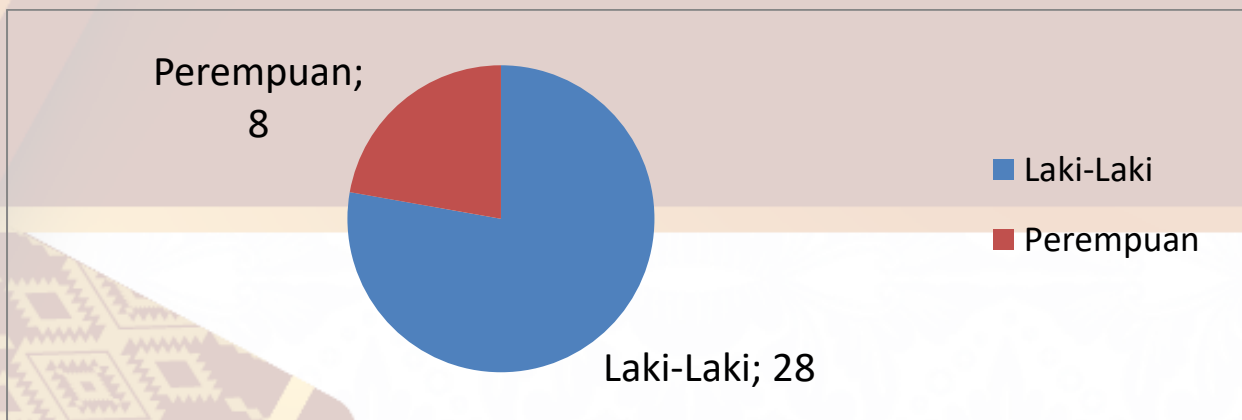
2. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	28	77,78%
2	Perempuan	8	22,22%
Jumlah		36	100%

Gambar 1. 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Sub Bagian Umum

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Laki-laki lebih mendominasi dengan jumlah 28 orang atau 77,78% dari jumlah keseluruhan pegawai, sedangkan perempuan hanya berjumlah 8 (enam) orang atau 22,22% dari total seluruh pegawai.

3. Keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

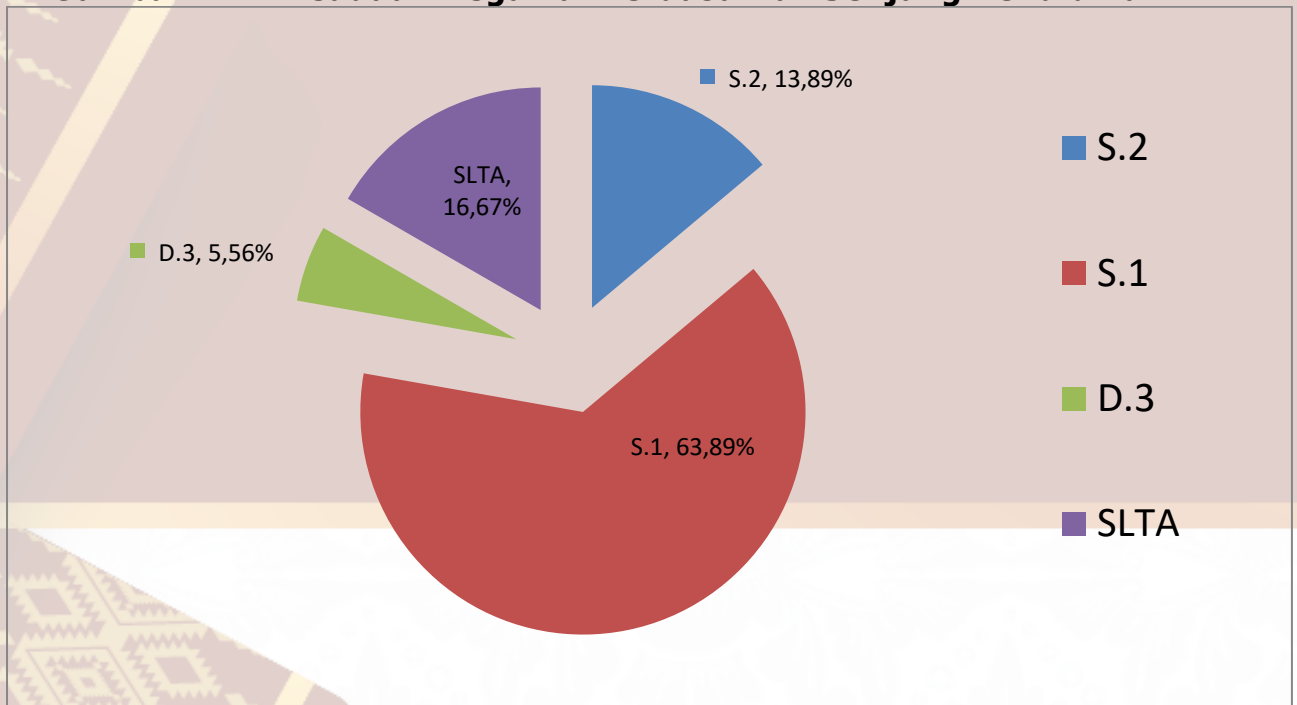
Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
2	S.2	5	13,89%
3	S.1	23	63,89%
4	D.3	2	5,56%
7	SLTA	6	16,67%
Jumlah		36	100%

Sumber : Sub Bagian Umum

Gambar 1. 4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Sub Bagian Umum

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dari 36 pegawai Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo tahun 2025 dari tingkat pendidikan didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S.1 sebanyak 23 orang (63,89%), diikuti pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6 (enam) orang (16,67%), dan tingkat pendidikan

S.2 sebanyak 5 (lima) orang (13,89%), serta Tingkat Pendidikan D.3 sebanyak 2 (dua) orang (5,56%).

Terlihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Sosial menunjukkan sumber daya aparatur yang sangat berpotensi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial.

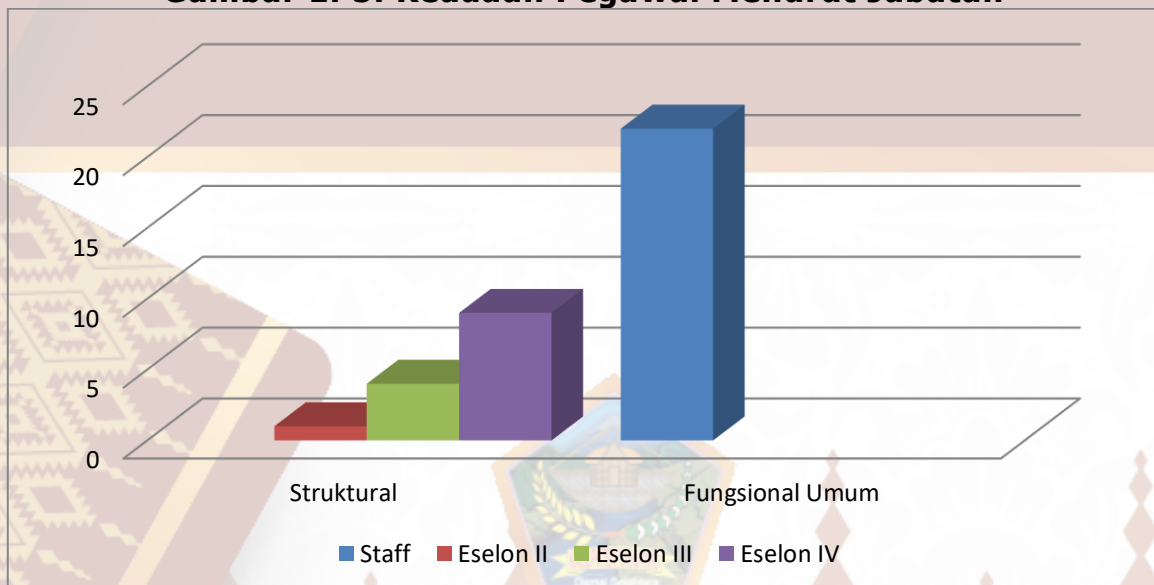
4. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan

Keadaan pegawai berdasarkan jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Struktural	14
	- Eselon II	1
	- Eselon III	4
	- Eselon IV	9
2	Fungsional Umum	22
	Jumlah	31

Gambar 1. 5. Keadaan Pegawai Menurut Jabatan



Sumber : Sub Bagian Umum

Dari grafik diatas dapat diketahui jumlah jabatan Struktural adalah 14 orang dan jabatan fungsional umum adalah 22 orang.

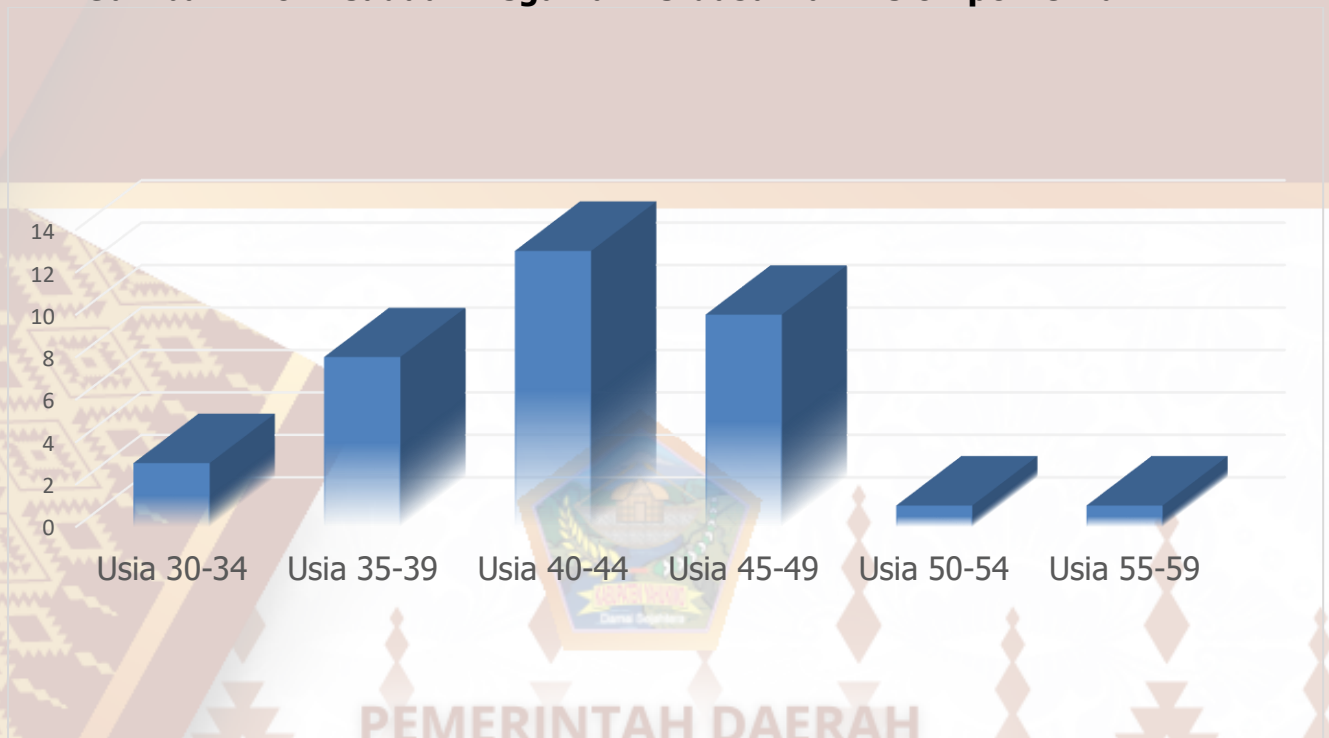
5. Keadaan Pegawai berdasarkan Kelompok Umur

Keadaan pegawai berdasarkan kelompok umur dibagi menjadi 6 (enam) rentang umur, yang masing-masing rentang berjarak 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Keadaan Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

NO	RENTANG UMUR	JUMLAH PEGAWAI
1	30 – 34	3
2	35 – 39	8
3	40 – 44	13
4	45 – 49	10
5	50 – 54	1
6	55 – 59	1

Gambar 1. 6. Keadaan Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur



D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, permasalahan utama yang dihadapi antara lain masih tingginya jumlah masyarakat rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), belum optimalnya akurasi dan pemutakhiran data sosial, keterbatasan jangkauan pelayanan akibat kondisi geografis, belum optimalnya penanganan kemiskinan secara terpadu, terbatasnya pelayanan rehabilitasi sosial, serta belum kuatnya sistem perlindungan sosial dan penanganan kedaruratan sosial. Selain itu, pemberdayaan sosial masyarakat, termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT), masih belum optimal, didukung pula oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana prasarana, dan sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo diarahkan pada peningkatan kualitas dan ketepatan sasaran pelayanan kesejahteraan sosial, penguatan perlindungan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan respon kedaruratan sosial, serta penguatan tata kelola pelayanan sosial yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis data.

1. Masih tingginya jumlah masyarakat rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kabupaten Yahukimo masih menghadapi tingginya kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan sosial, seperti:

- fakir miskin,
- anak terlantar,
- lanjut usia terlantar,
- penyandang disabilitas,
- keluarga rentan,

- masyarakat terdampak bencana,
- serta kelompok yang mengalami kerentanan sosial lainnya.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan sosial dasar masih cukup tinggi, sementara kapasitas intervensi pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh sasaran secara merata.

2. Belum optimalnya akurasi, validitas, dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial

Salah satu persoalan paling mendasar dalam urusan sosial adalah masih belum optimalnya kualitas data sasaran, baik yang berkaitan dengan:

- data fakir miskin,
- data keluarga miskin/rentan,
- data penerima bantuan sosial,
- data penyandang disabilitas,
- data anak terlantar,
- maupun data kelompok rentan lainnya.

Ketidakkakuratan data menyebabkan intervensi sosial berisiko tidak tepat sasaran, menimbulkan duplikasi penerima, exclusion error, maupun inclusion error. Pada konteks Yahukimo, draf RPJMD juga mencatat bahwa pendataan KAT belum lengkap dan akurat, yang memperkuat pentingnya pembenahan data sosial berbasis wilayah.

3. Keterbatasan jangkauan pelayanan sosial akibat kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah

Kabupaten Yahukimo memiliki karakteristik wilayah yang luas, bergunung, dan pada banyak titik masih sulit dijangkau. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan sosial, terutama dalam hal:

- verifikasi lapangan,
- asesmen sosial,
- penyaluran bantuan,
- penanganan kasus,
- pendampingan sosial,
- serta respon cepat terhadap kondisi darurat sosial.

Akibatnya, tidak semua masyarakat rentan dapat memperoleh pelayanan sosial secara cepat, merata, dan berkelanjutan. RPJMD Yahukimo sebelumnya juga mengidentifikasi rendahnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah sebagai persoalan pembangunan daerah yang memengaruhi layanan dasar dan urusan sosial.

4. Belum optimalnya penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Permasalahan kemiskinan di daerah tidak cukup ditangani hanya melalui bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui:

- perlindungan sosial,
- pemberdayaan ekonomi keluarga,
- peningkatan akses layanan dasar,
- penguatan ketahanan keluarga,
- serta sinergi lintas OPD.

Permasalahan yang masih sering muncul adalah bahwa penanganan kemiskinan belum sepenuhnya terintegrasi antara aspek bantuan sosial, pemberdayaan, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam forum perencanaan RPJMD 2025–2029, Pemkab Yahukimo juga menekankan arah pembangunan yang terukur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan
Pelayanan rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan seperti:

- penyandang disabilitas terlantar,
- anak terlantar,
- lanjut usia terlantar,
- gelandangan/pengemis (jika ada kasus),
- korban kekerasan atau keterlantaran sosial,
- serta kelompok dengan hambatan fungsi sosial,

masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pendataan, penjangkauan, asesmen, tindak lanjut kasus, maupun keterbatasan sarana layanan. Draf RPJMD Yahukimo 2025–2029 juga menyoroti belum efektifnya rehabilitasi sosial bagi PMKS serta belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar untuk disabilitas, anak terlantar, dan lansia terlantar.

6. Belum kuatnya sistem perlindungan sosial dan penanganan kedaruratan sosial



Kabupaten Yahukimo merupakan wilayah yang rentan terhadap gangguan sosial dan kondisi kedaruratan yang dapat berdampak pada masyarakat, baik akibat:

- bencana alam,
- gangguan keamanan,
- perpindahan penduduk rentan,
- keterisolasian wilayah,
- maupun krisis sosial lainnya.

Dalam situasi seperti itu, Dinas Sosial dituntut mampu hadir melalui skema perlindungan sosial, bantuan darurat, layanan dukungan dasar, serta koordinasi lintas sektor. Namun, kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan, dan sistem respon sosial sering kali belum sepenuhnya kuat. Draf RPJMD Yahukimo 2025–2029 juga memasukkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial sebagai area yang belum efektif. Insiden kekerasan di Yahukimo pada 2025 menunjukkan bahwa kerentanan sosial dan kebutuhan perlindungan terhadap warga terdampak bisa meningkat secara tiba-tiba.

7. Belum optimalnya pemberdayaan sosial masyarakat, termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Karakteristik sosial masyarakat di Yahukimo menuntut pendekatan pelayanan sosial yang tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga pemberdayaan. Hal ini menjadi penting terutama bagi:

- keluarga miskin,

- kelompok rentan,
- komunitas adat terpencil,
- masyarakat dengan keterbatasan akses layanan dasar.

Permasalahan yang masih dihadapi antara lain belum optimalnya fasilitasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian. Draf RPJMD Yahukimo 2021–2026 secara spesifik memetakan belum efektifnya pemberdayaan sosial KAT, belum optimalnya peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT, serta rendahnya sinergi antarsektor dalam penanganan KAT.

8. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, SDM, dan sarana pendukung pelayanan sosial

Efektivitas pelayanan Dinas Sosial sangat ditentukan oleh:

- kualitas SDM pelaksana,
- ketersediaan pendamping/tenaga sosial,
- dukungan sarana prasarana,
- sistem kerja lapangan,
- serta tata kelola layanan sosial.

Dalam konteks daerah dengan tantangan geografis seperti Yahukimo, keterbatasan kapasitas kelembagaan dapat berdampak langsung pada kualitas dan cakupan pelayanan. RPJMD Yahukimo sebelumnya juga mengidentifikasi bahwa penataan personel berbasis kompetensi dan ketersediaan SDM yang berkompeten masih menjadi isu umum tata kelola pemerintahan daerah.

9. Belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Urusan sosial pada dasarnya tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Sosial sendiri. Penanganan persoalan sosial sangat bergantung pada kolaborasi dengan OPD dan pemangku kepentingan lain, seperti:

- Dinas Kesehatan,
- Dinas Pendidikan,
- Dinas Dukcapil,
- Dinas PMK/Kampung,
- BPBD,
- Dinas PUPR/Perkim,
- DP3A,
- Bappeda,
- instansi vertikal,
- serta pemerintah distrik dan kampung.

Permasalahan yang sering muncul adalah belum kuatnya integrasi program, sinkronisasi data, dan koordinasi penanganan kasus di lapangan.

Draf RPJMD Yahukimo juga menyinggung rendahnya sinergi dan integrasi antarsektor, terutama dalam penanganan KAT.

Berdasarkan permasalahan tersebut, isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 diarahkan pada peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat, pemerataan akses layanan perpustakaan, penguatan sarana dan

prasarana perpustakaan, transformasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi, penguatan tata kelola kearsipan daerah, peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, penguatan implementasi kearsipan elektronik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan

1. Peningkatan kualitas dan ketepatan sasaran pelayanan kesejahteraan sosial;

Isu ini berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, berbasis data yang valid, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

2. Penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan;

Isu ini menekankan pentingnya memperkuat peran Dinas Sosial dalam menjamin perlindungan dasar bagi kelompok masyarakat yang menghadapi risiko sosial dan ekonomi.

3. Penguatan rehabilitasi sosial dan pelayanan dasar bagi PPKS;

Isu ini menyoroti perlunya peningkatan kualitas layanan bagi kelompok yang mengalami keterlantaran, keterbatasan fungsi sosial, atau membutuhkan intervensi sosial khusus.

4. Penguatan pemberdayaan sosial dan kemandirian Masyarakat;

Isu ini penting agar intervensi sosial tidak berhenti pada bantuan, tetapi juga mendorong keberfungsian sosial, kemandirian keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas komunitas.

5. Peningkatan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana serta kedaruratan sosial;

Dinas Sosial perlu memperkuat kapasitas respon terhadap situasi darurat agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh perlindungan dan bantuan sosial dasar.

6. Penguatan tata kelola pelayanan sosial berbasis kolaborasi lintas sektor;

Isu ini menegaskan bahwa keberhasilan urusan sosial memerlukan data terintegrasi, Koordinasi lintas OPD, sinergi program, serta dukungan distrik dan kampung.

7. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pelayanan sosial yang efektif hanya dapat dicapai bila kelembagaan Dinas Sosial diperkuat melalui peningkatan kompetensi SDM, penguatan sistem kerja, dukungan sarana prasarana, dan manajemen layanan yang lebih adaptif.

Keterkaitan antara Permasalahan dan isu strategis akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Isu Strategis Yang Menjawab Permasalahan

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1.	Masih Tingginya jumlah Masyarakat rentan dan pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS)	Peningkatan kualitas dan ketetapan sasaran pelayanan kesejahteraan social
2.	Belum optimalnya akurasi, validitas, dan pemutakhiran data kesejahteraan social	Penguatan perlindungan social bagi Masyarakat miskin dan rentan
3.	Belum optimalnya penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan	
4.	Keterbatasan jangkauan pelayanan social akibat kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah	Peningkatan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana serta kedaruratan social

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
5.	Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi social bagi kelompok rentan	Penguatan rehabilitasi social dan pelayanan dasar bagi PPKS
6.	Belum kuatnya system perlindungan social dan penanganan kedaruratan social	Penguatan pemberdayaan social dan kemandirian Masyarakat
7.	Belum optimalnya pemberdayaan social Masyarakat, termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
8.	Keterbatasan kapasitas kelembagaan, SDM, dan sarana pendukung pelayanan social	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan social
9.	Belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Penguatan tata Kelola pelayanan social berbasis kolaborasi lintas sektor

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Tahun 2025.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang organisasi, aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang di hadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan/atau Perubahan Perjanjian Kinerja terakhir pada tahun tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo berpedoman pada rencana kinerja Lima tahunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo tahun 2021-2026 kemudian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Strategis ini merupakan sebuah komitmen yang dibangun untuk menetapkan arah kebijakan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana arah kebijakan strategis dan tujuan tersebut harus mendukung Visi dan Misi Bupati Yahukimo yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026.

Arti penting perencanaan kinerja yang dituangkan dalam perencanaan strategis 2021-2026 bagi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo adalah untuk menetapkan arah kebijakan yang akan dituju dan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan secara tepat dan terukur. Renstra ini adalah respons organisasi terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan-perubahan lingkungan strategi yang terjadi.

Menyadari begitu besarnya perubahan lingkungan strategis yang terjadi, maka diperlukan komitmen yang tinggi untuk senantiasa mengantisipasi dan menuangkannya dalam butiran tekad/ perjanjian untuk direalisasikan menjadi hal yang nyata. Jika diperlukan, maka Renstra ini pun dapat dirubah dan disesuaikan lagi dengan perkembangan atau perubahan lingkungan strategis.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan program beserta indicator hasil program yang dapat diukur. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

Visi Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo dalam RPJMD 2021-2026 dan misi yang diemban oleh Dinas Sosial:

Visi Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo dalam RPJMD 2021-2026:

**"MEMBANGUN DENGAN HATI MEWUJUDKAN
YAHUKIMO YANG BARU, AMAN, DAMAI, SEHAT,
CERDAS, DAN BERINTEGRITAS"**

Misi Ke IV RPJMD 2021-2026:

**"MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM, SOSIAL,
POLITIK DAN HAM"**

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, isu strategis memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, sasaran strategis, program, dan kegiatan perangkat daerah. Isu strategis pada dasarnya merupakan persoalan-persoalan utama yang bersifat penting, mendesak, dan memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Bagi Dinas Sosial, isu strategis tidak hanya dipahami sebagai daftar permasalahan yang dihadapi, tetapi juga sebagai fokus prioritas yang harus dijawab melalui perencanaan yang terarah dan terukur. Oleh karena itu, sasaran strategis yang dirumuskan oleh perangkat daerah harus memiliki hubungan yang jelas, logis, dan langsung dengan isu strategis yang telah diidentifikasi. Dengan kata lain, sasaran strategis merupakan bentuk respon atau jawaban kebijakan terhadap isu strategis. Jika isu strategis menggambarkan apa persoalan utama yang harus ditangani, maka sasaran strategis menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan sebagai hasil dari upaya penanganan persoalan tersebut. Hubungan keduanya harus bersifat kausal dan saling menjelaskan, sehingga arah pembangunan perangkat daerah menjadi lebih fokus, terukur, dan akuntabel.

Hubungan antara isu strategis dan sasaran strategis juga sangat menentukan kualitas indikator kinerja yang akan digunakan. Sasaran strategis yang baik akan menghasilkan indikator yang lebih tepat, terukur, dan relevan. Sebaliknya, apabila sasaran strategis tidak dibangun dari isu strategis yang jelas, maka indikator kinerja yang dihasilkan sering kali menjadi tidak fokus, terlalu administratif, atau bahkan tidak mencerminkan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai. Oleh karena itu, keterkaitan antara isu strategis dan sasaran strategis tidak hanya penting pada tahap penyusunan

dokumen, tetapi juga sangat menentukan kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah di kemudian hari.

Dalam kerangka manajemen kinerja pemerintahan, isu strategis dapat dipandang sebagai titik awal analisis, sedangkan sasaran strategis merupakan bentuk penjabaran arah perubahan yang diinginkan. Artinya, sasaran strategis bukan sekadar kalimat normatif yang terdengar baik, melainkan harus menjadi jawaban yang nyata dan terukur atas isu yang benar-benar dihadapi. Dengan demikian, keberadaan sasaran strategis harus dapat menjelaskan: isu apa yang sedang direspon, perubahan apa yang ingin diwujudkan, dan hasil apa yang ingin dicapai.

Bagi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, keterkaitan ini menjadi semakin penting karena urusan perpustakaan dan kearsipan memiliki tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi kondisi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, akses masyarakat terhadap layanan, pemanfaatan teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, isu strategis yang dirumuskan harus benar-benar mencerminkan kondisi faktual pelayanan perangkat daerah, sedangkan sasaran strategis harus menjadi arah perubahan yang realistis, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan hubungan tersebut, maka dapat dipahami bahwa isu strategis dan sasaran strategis bukan dua hal yang berdiri sendiri, melainkan dua komponen yang saling terkait dan saling menguatkan. Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan fokus intervensi pembangunan perangkat daerah, sedangkan sasaran strategis menjadi bentuk pernyataan hasil yang ingin dicapai dari intervensi tersebut. Jika hubungan keduanya tersusun dengan baik, maka dokumen

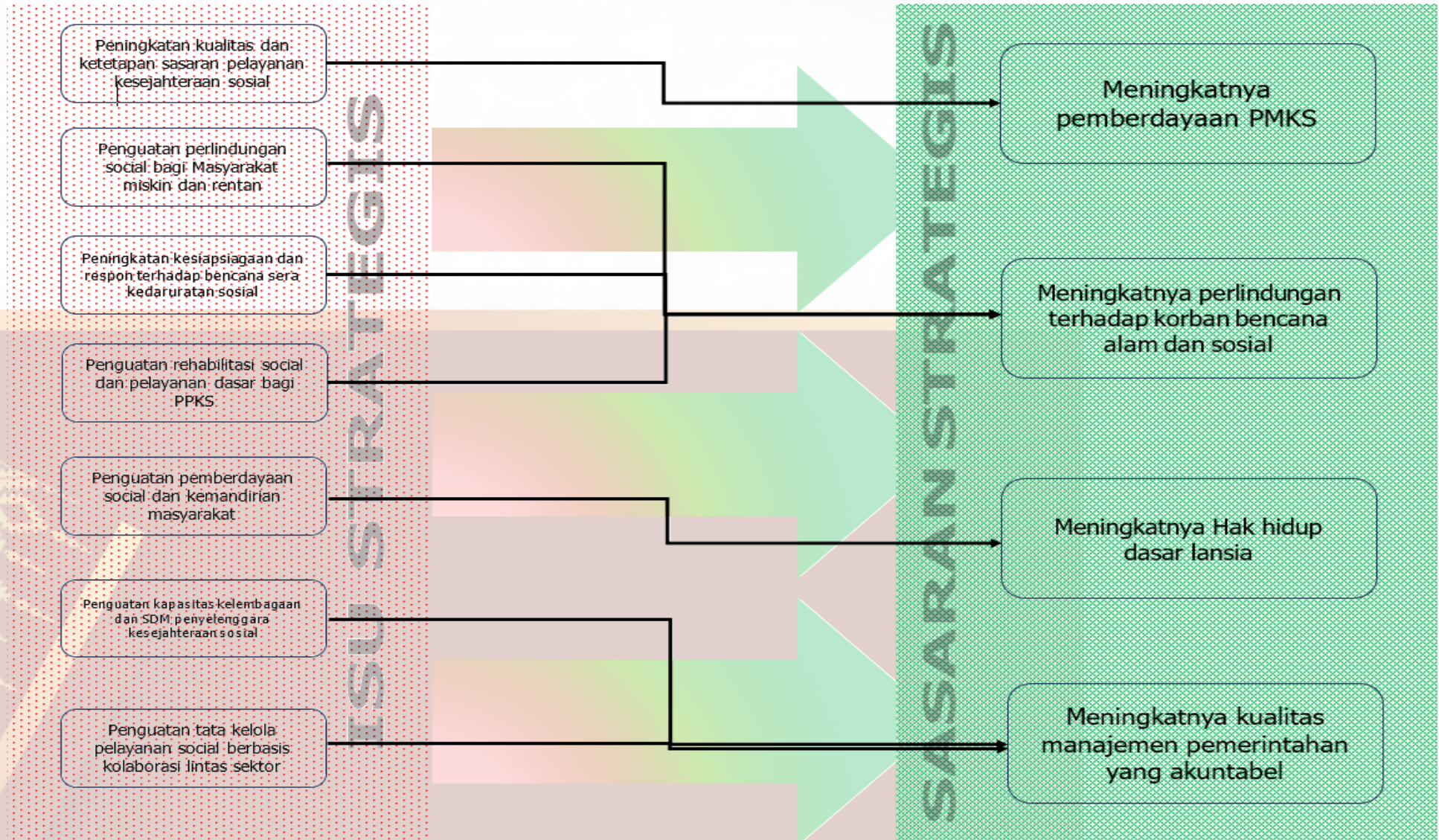
perencanaan akan memiliki alur logika yang kuat, mudah dipahami, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substansi.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas di BAB I dan juga isu strategis yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial, maka berikut sasaran strategis yang telah dirumuskan secara realistis, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Yang Menjawab Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	NO	SASARAN STRATEGIS
1.	Peningkatan kualitas dan ketetapan sasaran pelayanan kesejahteraan social	1.	Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan social
2.	Penguatan perlindungan social bagi Masyarakat miskin dan rentan	2.	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
3.	Peningkatan kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana serta kedaruratan social		
4.	Penguatan rehabilitasi social dan pelayanan dasar bagi PPKS		
5.	Penguatan pemberdayaan social dan kemandirian Masyarakat	3.	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia
6.	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan social	4.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
7.	Penguatan tata Kelola pelayanan social berbasis kolaborasi lintas sektor		

Gambar 2. 1. Sasaran Strategis Yang Menjawab Isu Strategis



Berdasarkan uraian isu strategis yang telah dijawab oleh sasaran strategis diatas maka ditetapkanlah sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo sebagai berikut:

1. Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial;
2. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel;
3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS;
4. Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur sasaran strategis diatas, diperlukan alat ukur yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran strategis Perangkat Daerah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indicator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indicator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan instansi tersebut sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah menetapkan Indikator Kinerja Umum (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel berikut:



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN YAHUKIMO
Periode 2021-2026**

1. Instansi : Dinas Sosial
2. Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan Daerah bidang sosial serta tugas lainnya yang diberikan Bupati.

3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang sosial;
 - c. penyusunan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi sosial;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial
2	Implementasi Pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Gender
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sumbangan pendapatan perempuan
4	Optimalnya Pencegahan dan Penanganan Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang terlayani

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani
5	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat Capaian Kota Layak Anak
6	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Tingkat Serapan Anggaran

Sasaran diupayakan dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, untuk setiap indicator kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis, indicator kinerja dan target per-tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Sosial adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 3 Rencana Strategis Dinas Sosial

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100	100	100	100	100
		Persentase tagana aktif	%	75	80	85	90	95
2	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	BB	BB
		Persentase menurunnya temuan material	%	N/A	20	20	20	20
		Persentase aset kondisi baik	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya pemberdayaan PMKS	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	8	10	12	14	14
		Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	%	10	15	20	25	25
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	%	20	25	30	35	35
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	70	75	80	85	90
4	Meningkatnya hak hidup dasar lansia	Ruang lingkup penyelenggaraan kota ramah lansia	%	2	4	6	8	8

Sumber: Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021 - 2026

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2021-2026, Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja dan target capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahun 2025


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%
		Persentase Tagana Aktif	90%
2	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	BB
		Persentase menurunnya temuan material	20%
		Persentase aset kondisi baik	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14%
		Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	25%
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35%
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	85%
4	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	8 Kota

Perjanjian kinerja merupakan komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Bupati selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala OPD. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah sasaran kinerja, indicator, dan target yang akan dicapai dalam tahun 2025:



Gambar 2. 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO DINAS SOSIAL Alamat : Jalan Kimyal, Dekai – Sumohai</p>
<p>PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: LINTIKON KENANGALEM, SH., M.Si
Jabatan	: Plt. Kepala Dinas Sosial
selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: DIDIMUS YAHULI, SH
Jabatan	: BUPATI YAHUKIMO
selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Sumohai, 28 Oktober 2025	
PIHAK KEDUA BUPATI YAHUKIMO	PIHAK PERTAMA Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo
 DIDIMUS YAHULI, SH	 LINTIKON KENANGALEM, SH, M.SI PEMBINA IV/a NIP. 198308162010041004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL TAHUN 2025**

**Nama SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN YAHUKIMO
Tahun Anggaran : 2025**

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan (Rp)
1.	Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosal	Persentase bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/ kota Sub Kegiatan : Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	2.500.000.000
		Persentase Tagana aktif	%	90	-	-
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70,1 (BB)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	35.686.040
		Persentase menurunnya temuan material	%	20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.963.550
		Persentase aset kondisi baik	%	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.180.000
3	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	14	-	-
		Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	%	25	-	-
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	%	35	-	-

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan (Rp)
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	85	-	-
4	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	Kota	8	-	-
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						Rp2.559.829.590

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah :

Program:	Anggaran:	Sumber Dana :
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp59.829.590,00	APBD
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp2.500.000.000,00	APBD
Jumlah anggaran keseluruhan program (Utama dan Rutin)	Rp2.559.829.590,00	APBD

Sumohai, 28 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
WALIKOTA YAHUKIMO



DIDIMUS YAHULI, SH

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Yahukimo



UNTIRION KENANGALEM, SH. M.SI
PEMBINA IV/a
NIP. 198308162010041004

E. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah diperjanjikan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo melaksanakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp2.408.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Program Dan Anggaran Dinas Sosial

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Rp59.829.590	APBD
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp2.398.500.000	APBD
Jumlah		Rp2.408.500.000	

Adapun uraian kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Rp59.829.590

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/ KOTA

- a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Rp35.686.040
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah Rp16.963.550
- c. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Rp7.180.000

2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Rp2.500.000.000

JAMINAN SOSIAL

- a. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Rp2.500.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui Renstra dan Rencana Kinerja/ Perjanjian Kinerja. Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dituangkan melalui penilaian dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo.

Penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur pencapaian kinerja Dinas Sosial mengenai kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dengan demikian dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengurai, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Analisis dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan program, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Pada Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo tahun 2025 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indicator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2025.

Adapun metode pengukuran kinerja dengan realisasi kinerja yang digunakan adalah membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Pengukuran capaian kinerja atas setiap kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara rencana/ target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Untuk memenuhi kriteria tersebut maka indikator kinerja harus menggunakan data kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, pertanggungjawaban, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Pengumpulan data kinerja di lingkungan Dinas Sosial diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektifitas.

Data kinerja yang digunakan telah diverifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan data yang akurat dan akuntabel. Data tersebut diperoleh melalui laporan bulanan dan laporan lainnya baik realisasi kegiatan maupun keuangan serta output yang dihasilkan kemudian dicocokkan dengan sumber data dari sekretariat dan bidang-bidang dalam struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi indikator kinerja sasaran termasuk IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang berada dibawah target untuk mengenali factor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka Capaian Kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Kriteria pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran Strategi Dan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d < 85	Berhasil
3	55 s/d < 70	Cukup Berhasil
4	< 55	Kurang Berhasil

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dengan capaian kinerja sasaran dan realisasi sebagai berikut:



Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%	100%
		Persentase Tagana Aktif	90%	0%	0%
2	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	BB	Belum Dievaluasi	Belum Dievaluasi
		Persentase menurunnya temuan material	20%	N/A	N/A
		Persentase aset kondisi baik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14%	12%	100%
		Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	25%	0%	0%
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35%	0%	0%
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	85%	0%	0%
4	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	8 Kota	0 Kota	0%

Tabel 3. 3 Hasil Pengukuran Pencapaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada Peningkatan/ Penurunan
		Persentase Tagana Aktif	%	0%	0%	0%	0%	Tidak Ada Peningkatan/ Penurunan
2	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	Belum Dievaluasi	Belum Dievaluasi	60,32/ B	100,52%	Belum Dievaluasi
		Persentase menurunnya temuan material	%	0%	N/A	0%	N/A	Tidak Ada Peningkatan/ Penurunan
		Persentase aset kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	Tidak Ada Peningkatan/ Penurunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
3	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	12%	100%	12%	100%	Tidak Ada Peningkatan/ Penurunan
		Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	%	0%	0%	0%	0%	Tidak Ada Peningkatan/ Penurunan
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	%	0%	0%	0%	0%	Tidak Ada Peningkatan/ Penurunan
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	0%	0%	0%	0%	Tidak Ada Peningkatan/ Penurunan
4	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	Kota	0 Kota	0%	0 Kota	0%	Tidak Ada Peningkatan/ Penurunan

Tabel 3. 4 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir jangka menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir jangka menengah	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%	100
		Persentase Tagana Aktif	95%	0%	0
2	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	70,01/ BB	Belum Dievaluasi	Belum Dievaluasi
		Persentase menurunnya temuan material	20%	N/A	N/A
		Persentase aset kondisi baik	100%	100%	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14%	12%	85,71
		Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	25%	0%	0
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	35%	0%	0
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	90%	0%	0
4	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	8 Kota	0 Kota	0

Analisis dan evaluasi atas capaian sasaran dan kinerja pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS I
Meningkatnya Perlindungan
Terhadap Korban Bencana
Alam dan Sosial

Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial menjadi isu yang sangat penting dalam berbagai aspek kebijakan dan pelayanan sosial. Beberapa langkah yang diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yahukimo untuk meningkatkan perlindungan ini meliputi:

Pendampingan Psikososial bagi Korban Bencana

Bencana alam dan sosial tidak hanya meninggalkan dampak fisik, tetapi juga psikologis. Pendampingan psikososial yang melibatkan konseling, terapi kelompok, dan pendidikan untuk pemulihan mental sangat penting untuk membantu korban agar dapat mengatasi trauma dan kembali pulih.

Program Asuransi Sosial dan Keuangan

Pemerintah dan organisasi kemanusiaan dapat mengembangkan program asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi keluarga yang terdampak bencana. Program ini bisa melibatkan pemulihan ekonomi bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal atau mata pencaharian.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial, dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

a. Indikator Kinerja Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari;

Indikator Kinerja ini diukur dengan membandingkan antara Jumlah Distrik yang ikut sosialisasi dan jumlah distrik yang ditargetkan dalam pelayanan kegiatan sosialisasi. Untuk lebih jelasnya berikut formulasi perhitungan yang digunakan:

$$\frac{\sum \text{Korban Bencana yang ditangani pada tahun} - n}{\sum \text{Korban Bencana tahun} - n} \times 100\%$$

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari, capaian kinerja yang telah didapat oleh Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu 100%, yang sesuai skala

pengukuran ordinal maka indikator kinerja Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari termasuk kategori "**Sangat Berhasil**".

◆ **Analisis penyebab keberhasilan dan alternative solusi yang telah dilakukan;**

Keberhasilan atas indikator kinerja Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari, disebabkan karena pada tahun 2025, telah terjadi Bencana alam banjir di Distrik Dekai pada awal Agustus 2025, hujan deras yang berlangsung lama menyebabkan banjir di Distrik Dekai. Banjir dengan ketinggian air mencapai 50 – 100 cm ini merendam berbagai fasilitas, termasuk dua jembatan penghubung antar kampung, dua tempat ibadah, satu kantor kepolisian sektor, satu fasilitas kesehatan, serta areal persawahan dan perkebunan warga yang berpotensi mengalami gagal panen. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat peristiwa ini. Namun berdampak pada aktifitas sehari-hari masyarakat sehingga Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo memberikan bantuan sembako kepada 10 kelompok korban bencana banjir diantaranya:

A. Kelompok I atas nama Bule Kobak



2. Kelompok II atas nama Yosam Kobak;



3. Kelompok III atas nama Yonis Amogoso;



4. Kelompok IV atas nama Masiot Silak;



5. Kelompok V atas nama Tinus Siep;



6. Kelompok VI atas nama Yafet Pahabol;



7. Kelompok VII atas nama Avalina Pahabol;



8. Kelompok VIII atas nama Yorim Kobak;



9. Kelompok IX atas nama Kael Kenelak;



10. Kelompok X atas nama Renis Kobak;



Sehingga capaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar pegawai Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, dengan memberikan data-data terkait pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan seksi sehingga mempermudah dalam pelayanan korban bencana.

Tabel 3. 5 Penyebab Keberhasilan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEBERHASILAN
1.	Korban Bencana Banjir di Distrik Dekai	Korban Bencana yang diberikan bantuan sebanyak 10 kelompok

◆ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Sosial dalam pencapaian indicator kinerja tersebut, memiliki 36 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo membutuhkan 41 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis I sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 5 (lima) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 3 (tiga) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis I, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar

Rp2.500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp2.500.000.000 atau jika dipresentasikan maka sebesar 100%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indikator kinerja Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari adalah sebagai berikut :

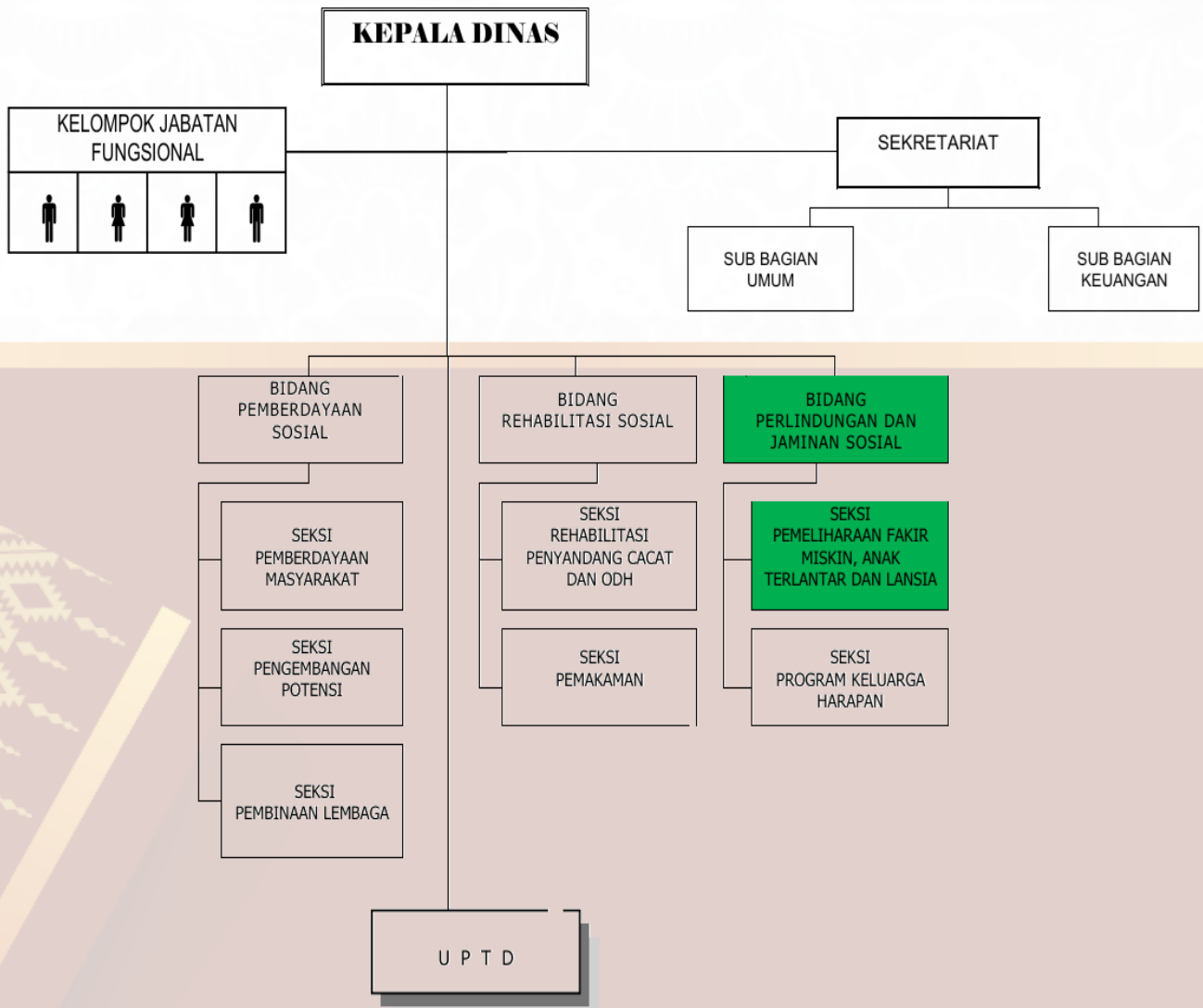
Tabel 3. 6 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis I Indikator Kinerja I

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp4.000.000.000	Rp2.500.000.000	Rp2.500.000.000	100%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indikator kinerja Persentase bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari adalah Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan seksi pendukungnya yaitu Seksi Pemeliharaan Fakir Miskin, Anak Terlantar dan Lansia.



Gambar 3. 1. Penanggungjawab Sasaran Strategis I IK I Sesuai Prosedur Kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Materia*), Dinas Sosial memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis I yaitu:

Tabel 3. 7 Bahan Kerja Sasaran Strategis I

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Pedoman dalam mengatur tahapan penanggulangan bencana, mulai dari penanganan korban bencana, penyediaan bantuan, dan hubungan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana
2	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pedoman dalam pemberian layanan perlindungan terhadap korban bencana dan sosial dengan menegaskan hak-hak dasar setiap individu
3	PP No. 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Petunjuk Teknis mengenai langkah-langkah perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial
4	PP No. 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	Petunjuk Teknis terkait pemulihan ekonomi pasca-bencana
5	Permensos. No. 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial	Petunjuk Teknis mengenai prosedur untuk pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran kepada korban bencana sosial dan alam

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis I kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Sosial untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 3. 8 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Konsolidasi terkait Pendistribusian bantuan sosial	<i>Belum Dilaksanakan</i>
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan fasilitas pengungsian bencana	<i>Belum Dilaksanakan</i>
3	Dinas Pendidikan	Koordinasi terkait layanan pendidikan yang diterima oleh anak-anak korban bencana	<i>Belum Dilaksanakan</i>
4	Dinas Kesehatan	Koordinasi terkait pemberian layanan kesehatan	<i>Belum Dilaksanakan</i>
5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi terkait alokasi dana yang tepat guna	<i>Sudah dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Sosial belum sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial dengan indicator kinerja Persentase bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu 3 (tiga) hari.

◆ Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Sosial telah memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	<p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/ kota</p>	Persentase bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	<i>Menunjang</i>

Dinas Sosial kabupaten yahukimo telah melaksanakan kegiatan yang telah tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dengan melalui beberapa tahap yaitu perencanaan dan persiapan kegiatan, koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi data, pengumpulan data awal sasaran fakir miskin, pendataan lapangan rumah tangga sasaran, verifikasi dan validasi data, pemutakhiran dan pembersihan data, entri/ pengolahan/ rekapitulasi data, penetapan hasil pemutakhiran data, pemanfaatan data untuk intervensi program sosial, monev dan pengendalian kualitas data, serta pelaporan dan dokumentasi kegiatan.



Tabel 3. 10 Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penilaian dan Identifikasi Korban Bencana	Bekerja sama dengan BPBD dan instansi terkait untuk mendapatkan data korban yang terdampak	Mengumpulkan data korban, menilai kondisi korban,
2	Koordinasi dan Perencanaan Pemberian Bantuan	Koordinasi dengan instansi terkait untuk merencanakan distribusi bantuan sosial yang efisien dan tepat sasaran	Merencanakan jenis bantuan, menyusun jadwal dan metode distribusi, menentukan alokasi dana dan sumber daya
3	Pengumpulan dan penyediaan bantuan sosial	Pengumpulan berbagai jenis bantuan sosial yang diperlukan dari berbagai sumber	Menerima dan mengelola berbagai jenis bantuan dan mengorganisir stok bantuan di pusat distribusi atau logistik
4	Distribusi bantuan sosial kepada korban	Tahap utama untuk memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan korban dengan cepat dan tepat	Penyebaran ke titik distribusi, koordinasi lapangan dan pelibatan masyarakat
5	Pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan	Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan untuk memastikan bantuan yang diberikan efektif dan sesuai dengan kebutuhan korban	Memantau jalannya distribusi bantuan, melakukan evaluasi terhadap kesesuaian jenis bantuan dan melakukan survei jika diperlukan
6	Pelaporan dan dokumentasi	Penyusunan laporan dan dokumentasikan seluruh proses penanganan bencana	Menyusun laporan kegiatan

Berdasarkan Program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan realisasi pelaksanaan, Dinas

Sosial telah melakukan beberapa tahapan dalam rangka pencapaian sasaran strategis I.

b. Indikator Kinerja Persentase Tagana Aktif;

Indikator Kinerja ini diukur dengan membandingkan antara Jumlah Distrik yang ikut sosialisasi dan jumlah distrik yang ditargetkan dalam pelayanan kegiatan sosialisasi. Untuk lebih jelasnya berikut formulasi perhitungan yang digunakan:

$$\sum \text{Tagana yang aktif}$$

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Tagana Aktif, capaian kinerja yang telah didapat oleh Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu 0%, yang sesuai skala pengukuran ordinal maka indikator kinerja Persentase Tagana Aktif termasuk kategori "**Kurang Berhasil**".

◆ Analisis penyebab kegagalan dan alternative solusi yang telah dilakukan;

Kegagalan atas indikator kinerja Persentase Tagana yang aktif, disebabkan karena pada tahun 2025, belum ada pembentukan taruna siaga bencana (tagana) sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/ HUK/ 2005 tentang Pembentukan Taruna Siaga Bencana. Sehingga capaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 yaitu sebesar 0%.

Tabel 3. 11 Penyebab Kegagalan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEGAGALAN
1.	Jumlah Tagana yang aktif di Kabupaten Yahukimo	Belum adanya pembentukan Taruna Siaga Bencana di Kabupaten Yahukimo

◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

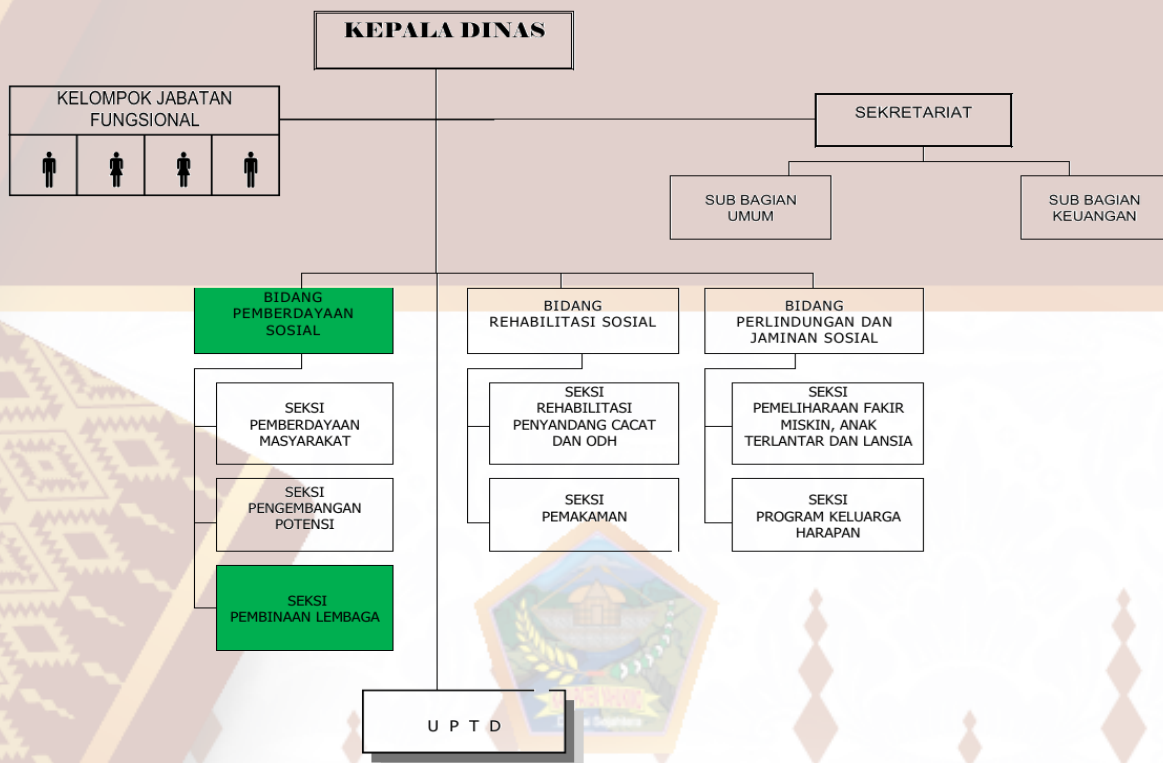
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Sosial dalam pencapaian indicator kinerja tersebut, memiliki 29 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo membutuhkan 36 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis I sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 6 (lima) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 5 (tiga) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis I indikator kinerja II, tidak mendapatkan anggaran. Adapun rincian anggaran yang mendukung indicator kinerja Persentase Tagana Aktif adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis I Indikator Kinerja II

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp0	Rp0	Rp0	0%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indicator kinerja Persentase Tagana aktif adalah Bidang Pemberdayaan Sosial dengan seksi pendukungnya yaitu Seksi Pembinaan Lembaga.

Gambar 3. 2. Penanggungjawab Sasaran Strategis I IK II Sesuai Prosedur Kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Materia*), Dinas Sosial memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis I indikator kinerja II yaitu:

Tabel 3. 13 Bahan Kerja Sasaran Strategis I Indikator Kinerja II

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	Permensos No. 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana	Pedoman umum bagi TAGANA termasuk tugas, fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban serta mekanisme kerja dalam penanggulangan bencana
2	Keputusan Dirjend. Bantuan dan jaminan sosial no. 1135A/ KEP/ BJS/ XI/ 2006 tentang pedoman perlengkapan dan atribut TAGANA serta tanda kecakapan/ keahlian khusus gugus tugas penanggulangan bencana bidang bantuan sosial	Pedoman mengenai perlengkapan, atribut, dan tanda kecakapan bagi anggota TAGANA

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis I Indikator Kinerja II kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Sosial untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 3. 14 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinasi dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat	<i>Belum Dilaksanakan</i>
2	Dinas Kesehatan	Menyediakan layanan kesehatan bagi korban bencana	<i>Belum Dilaksanakan</i>
3	Dinas Pendidikan	Kolaborasi dalam pemberian edukasi bagi siswa tentang kesiapsiagaan bencana	<i>Belum Dilaksanakan</i>
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Membangun jalur evakuasi dan fasilitas darurat	<i>Belum Dilaksanakan</i>
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Menyebarkan informasi bencana kepada masyarakat	<i>Belum Dilaksanakan</i>
6	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah dan pemulihan ekosistem pasca-bencana	<i>Belum Dilaksanakan</i>
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Koordinasi terkait penyediaan pangan darurat	<i>Belum Dilaksanakan</i>
8	Dinas Perhubungan	Koordinasi terkait distribusi logistik	<i>Belum Dilaksanakan</i>
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kolaborasi terkait administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana	<i>Belum Dilaksanakan</i>
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinasi terkait keamanan dan ketertiban	<i>Belum Dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Sosial sudah sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial dengan indikator kinerja Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari.

◆ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Untuk mendukung indikator kinerja di atas, Dinas Sosial telah memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	-	Persentase Tagana Aktif	<i>Tidak Menunjang</i>

Dinas Sosial kabupaten yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial melalui indikator kinerja persentase tagana aktif, tidak memiliki program dan kegiatan terkait.



2. Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS II

Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
yang Akuntabel

Evaluasi terhadap Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Yahukimo berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (Lima) komponen manajemen kinerja yaitu:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Evaluasi internal;
5. Pencapaian sasaran/ kinerja organisasi.

Sasaran terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi merupakan pemerintahan yang akuntabel, transparan menuju Good Governance untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah berprinsip pada azas keterbukaan, akuntabel, efektif dan efisien

dan partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta kebersihan dan keterpaduan tugas fungsi penyelenggara pemerintah dan pembangunan.

a. Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat, yang telah didapat oleh Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu **100,52%** oleh sebab itu masih menunggu Laporan Hasil Evaluasi dari Tim Evaluasi Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.

◆ Analisis penyebab keberhasilan dan alternative solusi yang telah dilakukan;

Berdasarkan hasil analisis di atas, capaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 adalah **100,52%** sesuai dengan skala pengukuran ordinal termasuk dalam kategori "**Sangat Berhasil**". Keberhasilan atas sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dengan indicator kinerja nilai evaluasi SAKIP OPD, tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar pegawai Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, dengan memberikan data-data terkait pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan seksi sehingga mempermudah dalam penyusunan dokumen SAKIP.



Tabel 3. 16 Penyebab Keberhasilan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEBERHASILAN
1.	Pengumpulan data-data terkait dokumen SAKIP	Koordinasi yang sangat baik antar pegawai Dinas Sosial
		Data-data terkait lengkap di setiap bidang dan seksi
2.	Dokumen SAKIP tersusun	Koordinasi yang sangat baik antar pegawai Dinas Sosial

◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

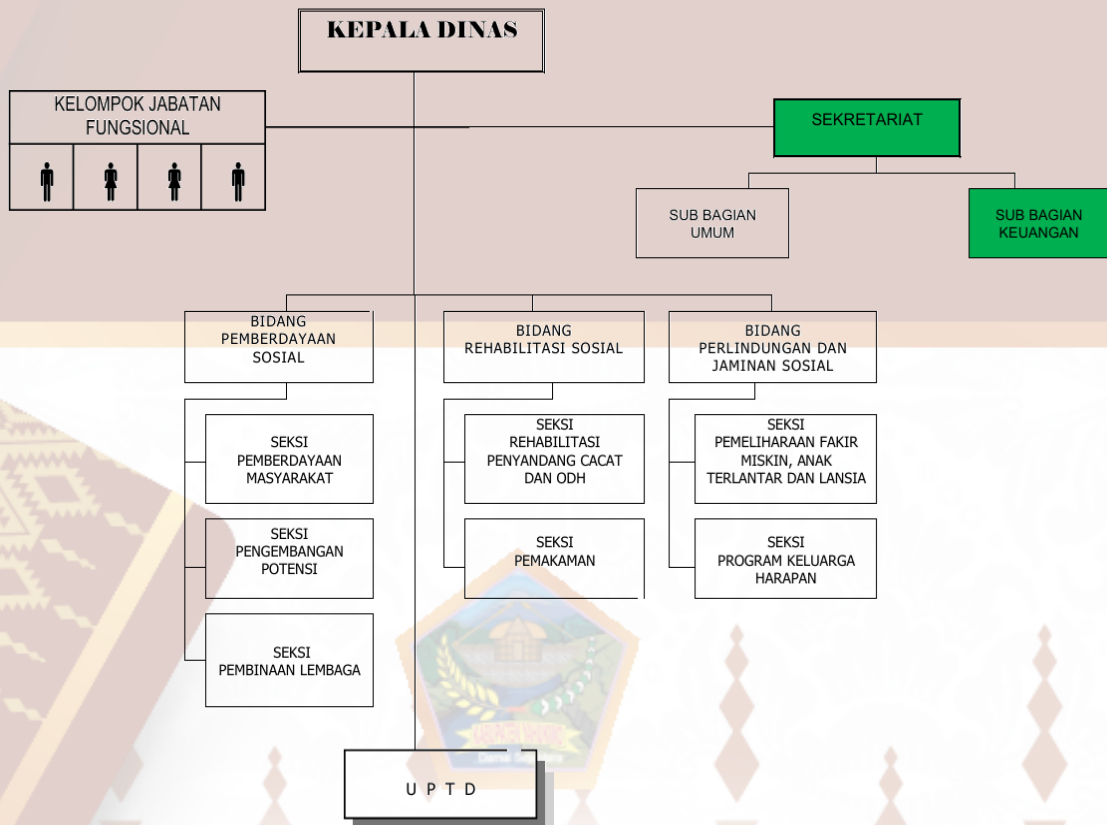
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Sosial dalam pencapaian indicator kinerja tersebut, memiliki 36 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo membutuhkan 40 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis II sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 7 (tujuh) orang pegawai, namun untuk sekarang sudah tersedia 5 (lima) orang pegawai. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis II, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar Rp35.686.040 dan terealisasi sebesar Rp35.686.040 atau jika dipresentasikan maka sebesar 100%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indicator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis II Indikator Kinerja I

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp37.640.040	Rp35.686.040	Rp35.686.040	100%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indicator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat adalah Sekretariat dengan sub bagian pendukungnya yaitu Sub Bagian Keuangan.

Gambar 3. 3. Penanggungjawab Sasaran Strategis II IK I Sesuai Prosedur Kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Materia*), Dinas Sosial memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis II IK I yaitu:

Tabel 3. 18 Bahan Kerja Sasaran Strategis II IK I

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	Menegaskan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara
2	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Mengatur integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3	UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	Mendorong kinerja ASN yang akuntabel dan berbasis hasil
4	PP No. 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dan kinerja
5	PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dasar hukum utama dalam penerapan SAKIP di seluruh instansi pemerintah
6	Perpres. No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Menetapkan kerangka SAKIP, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi, dan capaian kinerja

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
7	Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis SAKIP	Memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan SAKIP
8	Permen PAN-RB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi SAKIP	Mengatur evaluasi penerapan SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis II IK I kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Sosial untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.



Tabel 3. 19 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan Organisasi yang berbasis SMART	<i>Sudah dilaksanakan</i>
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penganggaran sesuai perencanaan	<i>Sudah dilaksanakan</i>
3	Bagian Organisasi Setda	Koordinasi dan konsultasi mengenai SAKIP	<i>Sudah dilaksanakan</i>
4	Inspektorat	Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan	<i>Sudah dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Sosial sudah sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat.

◆ Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Sosial telah memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat	Menunjang

Dinas Sosial kabupaten yahukimo telah melaksanakan kegiatan yang telah tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dengan melalui beberapa tahap dalam Sistem AKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja dan atau peningkatan kualitas.

Tabel 3. 21 Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Perencanaan Kinerja	Menyusun dokumen perencanaan kinerja berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi	Dokumen yang digunakan yaitu RENSTRA, RKPD, dan PK
2	Pengukuran Kinerja	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala untuk menilai pencapaian sasaran dan target	Alat yang digunakan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	TAHAPAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
3	Pelaporan Kinerja	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisi evaluasi hasil kinerja	LKjIP dibuat secara transparan dan berdasarkan data yang valid
4	Evaluasi Kinerja	Melakukan evaluasi internal dan eksternal terhadap kinerja instansi	Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat

Berdasarkan Program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Dinas Sosial telah melakukan beberapa tahapan dalam rangka pencapaian sasaran strategis II Indikator Kinerja I.

b. Indikator Kinerja Persentase Menurunnya temuan material;

Temuan material oleh Inspektorat terhadap OPD di tingkat Kabupaten umumnya terkait dengan masalah akuntabilitas keuangan, penyimpangan administrasi, pengelolaan SDM, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan bahwa OPD menjalankan tugasnya secara efisien, efektif, dan transparan. Setiap temuan yang ada akan menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah agar sesuai dengan prinsip *good governance*.

Indikator Kinerja ini diukur dengan membandingkan antara Jumlah TGR pada tahun 2025 dan Jumlah TGR pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya berikut formulasi perhitungan yang digunakan:

$$\frac{\sum \text{TGR pada tahun } - n}{\sum \text{TGR pada tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase menurunnya temuan material, yang telah didapat oleh Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu **Belum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat** oleh sebab itu capaian kinerja tidak dapat diukur.

◆ **Analisis penyebab keberhasilan dan alternative solusi yang telah dilakukan;**

Berdasarkan hasil analisis di atas, capaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 adalah **Tidak ada** sesuai dengan skala pengukuran ordinal termasuk dalam kategori "**Tidak ada**".

◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Sosial dalam pencapaian indicator kinerja tersebut, memiliki 36 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo membutuhkan 40 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis II sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 5 (lima) orang pegawai. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis II

Indikator Kinerja II, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar Rp16.963.550 dan terealisasi sebesar Rp16.963.550 atau jika dipersentasekan maka sebesar 100%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indicator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

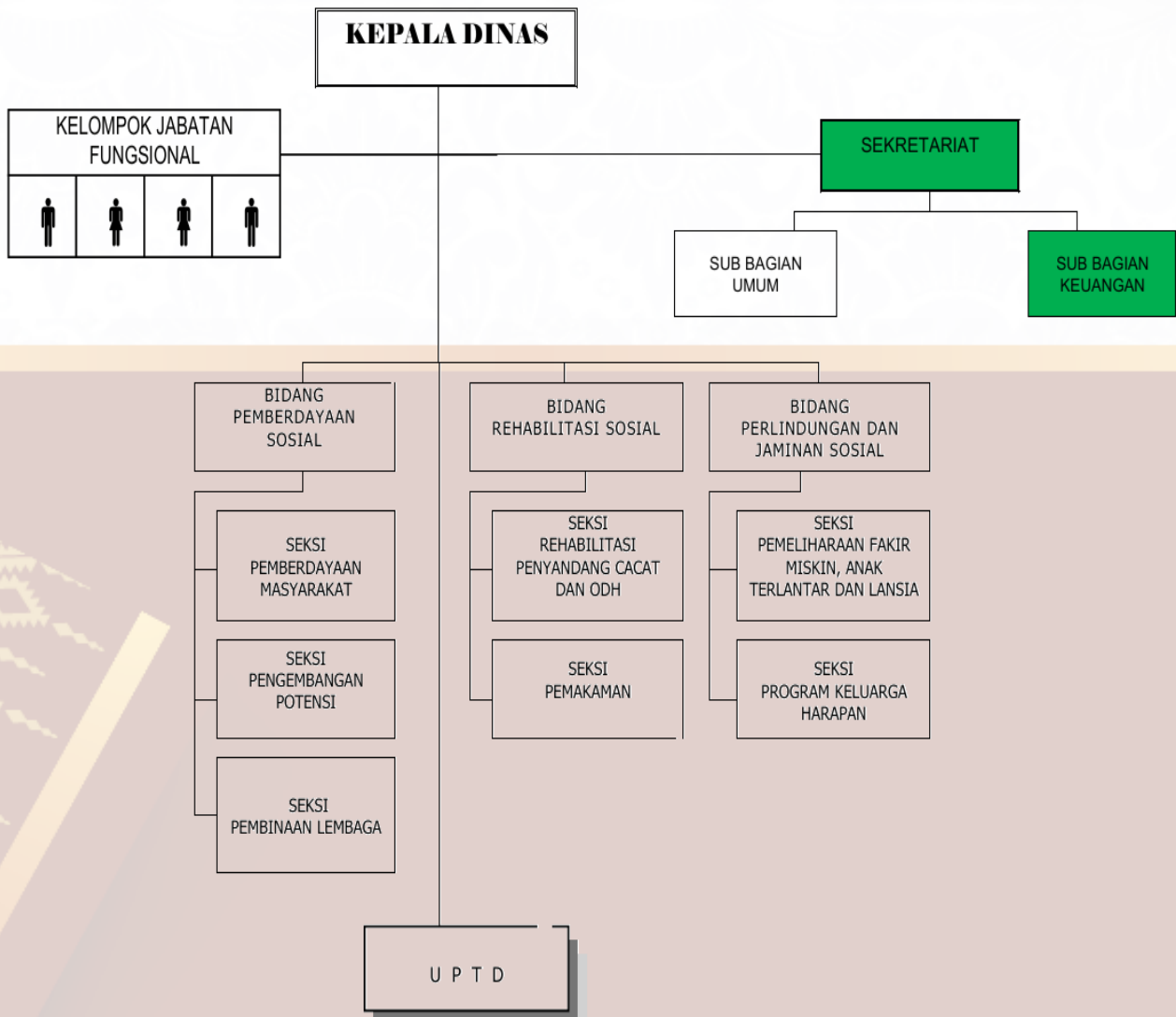
Tabel 3. 22 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis II Indikator Kinerja II

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp16.963.550	Rp16.963.550	Rp16.963.550	100%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indicator kinerja Persentase menurunnya temuan material adalah Sekretariat dengan sub bagian pendukungnya yaitu Sub Bagian Keuangan.



Gambar 3. 4. Penanggungjawab Sasaran Strategis II IK II Sesuai Prosedur Kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Material*), Dinas Sosial memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis II IK II yaitu:

Tabel 3. 23 Bahan Kerja Sasaran Strategis II IK II

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Aturan Dasar TGR
2	PP No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain	Pedoman mekanisme penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh PNS bukan bendahara atau pejabat lain
3	Permendagri No. 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah	Pedoman bagi Dinas Sosial dalam menyelesaikan kerugian daerah
4	Permensos No. 09 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain di lingkungan kementerian sosial	Petunjuk teknis tata cara penyelesaian kerugian negara di lingkungan kementerian sosial melalui TGR

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis II IK II, kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Sosial untuk lebih proaktif dalam pelaksanaan tugas.



Tabel 3. 24 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Inspektorat Daerah	Bekerjasama dalam menindaklanjuti temuan terkait pengelolaan anggaran dan program sosial	<i>Belum dilaksanakan</i>
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memastikan pengelolaan anggaran program sosial sesuai dengan ketentuan, serta menindaklanjuti temuan terkait pengelolaan keuangan	<i>Belum dilaksanakan</i>
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Koordinasi terkait penyusunan perencanaan program sosial yang efektif dan efisien untuk meminimalkan risiko kerugian	<i>Belum dilaksanakan</i>
4	OPD terkait kegiatan teknis sosial lainnya	Koordinasi dan konsolidasi terkait penurunan temuan material	<i>Belum dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Sosial sudah sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dengan indikator kinerja Persentase menurunnya temuan material.

◆ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Sosial telah memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota Kegiatan :</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD</p>	<p>Persentase menurunnya temuan material</p>	<p><i>Menunjang</i></p>

Dinas Sosial kabupaten yahukimo telah melaksanakan kegiatan yang telah tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, namun belum ada pengawasan dari Inspektorat sehingga tidak dapat diukur.

c. Indikator Kinerja Persentase Aset Kondisi Baik.

Indikator Kinerja Aset di Dinas Sosial yang menunjukkan bahwa aset tersebut dalam kondisi baik berkaitan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, serta memastikan aset tersebut berfungsi sesuai dengan tujuan

yang ditetapkan. Pengelolaan aset yang baik mencakup pengawasan, pemeliharaan, penggunaan, dan pelaporan yang akurat.

Indikator Kinerja ini diukur dengan membandingkan antara Jumlah Aset OPD yang kondisi baik pada tahun 2025 dan Jumlah aset di Dinas Sosial. Untuk lebih jelasnya berikut formulasi perhitungan yang digunakan:

$$\frac{\sum \text{Aset OPD yang kondisi baik}}{\sum \text{Aset di OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Aset Kondisi Baik, yang telah didapat oleh Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu 100% dan sesuai skala pengukuran ordinal termasuk dalam kategori "**Sangat Berhasil**".

◆ **Analisis penyebab keberhasilan dan alternative solusi yang telah dilakukan;**

Keberhasilan atas sasaran strategis meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dengan indicator kinerja persentase aset kondisi baik, tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar pegawai Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, dengan merawat dan memelihara aset di tiap-tiap ruangan.

Tabel 3. 26 Penyebab Keberhasilan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEBERHASILAN
1.	Aset dalam kondisi baik	Pemeliharaan terhadap aset kantor secara berkala

◆ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Sosial dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, memiliki 36 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo membutuhkan 40 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis II sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 5 (lima) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 4 (empat) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis II, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar Rp7.180.000 dan terealisasi sebesar Rp7.180.000 atau jika dipersentasekan maka sebesar 100%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indicator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

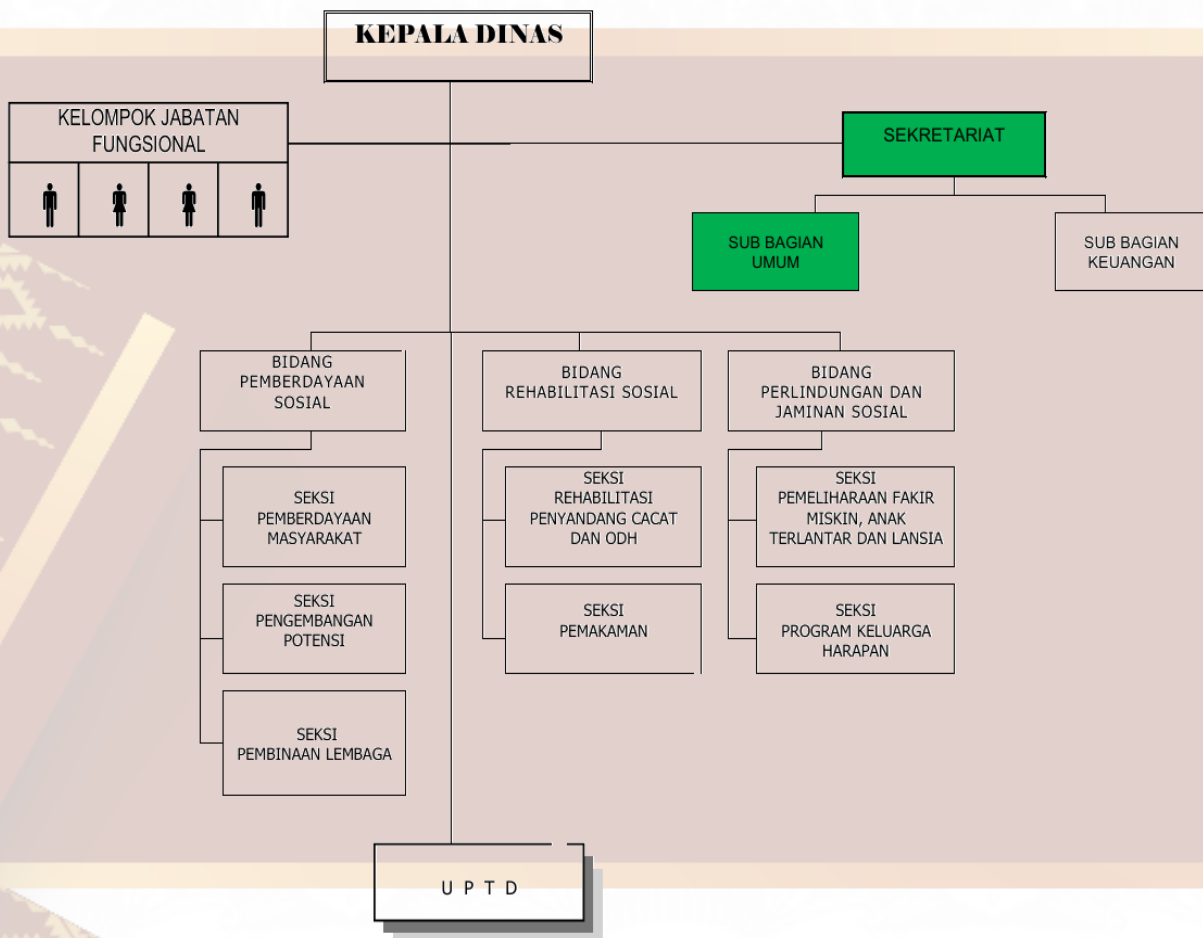
Tabel 3. 27 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis II Indikator Kinerja III

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp7.180.000	Rp7.180.000	Rp7.180.000	100%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Methode*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana

yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indicator kinerja persentase aset kondisi baik adalah Sekretariat dengan sub bagian pendukungnya yaitu Sub Bagian Umum.

Gambar 3.1
Penanggungjawab sasaran strategis II IK III sesuai prosedur kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Material*), Dinas Sosial memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis II IK III yaitu:

Tabel 3. 28 Bahan Kerja Sasaran Strategis II IK III

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah	Dasar Hukum pengelolaan aset milik daerah
2	Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024	Pedoman teknis bagi pemerintahan daerah dalam mengelola aset daerah

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis II Indikator Kinerja III, kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Sosial untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.



Tabel 3. 29 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi terkait pengelolaan aset	<i>Sudah dilaksanakan</i>
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi terkait perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Sosial	<i>Sudah dilaksanakan</i>
3	Bagian Hukum Setda	Pendampingan hukum dalam pengelolaan aset	<i>Belum dilaksanakan</i>
4	Inspektorat	Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan	<i>Belum dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Sosial sudah sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dengan indicator kinerja persentase aset kondisi baik.

◆ Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Sosial telah memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset Kondisi baik	<i>Menunjang</i>

Dinas Sosial kabupaten yahukimo telah melaksanakan kegiatan yang telah tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dengan melalui beberapa tahap berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan Aset;
3. Penerimaan, pencatatan, dan inventarisasi;
4. Penggunaan dan pemanfaatan;
5. Pemeliharaan dan pengamanan aset;
6. Penilaian aset;
7. Penghapusan aset;
8. Pemindahtanganan aset;
9. Pengawasan dan audit.



Tabel 3. 31 Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KET.
1	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran	Identifikasi kebutuhan aset, penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, penganggaran aset, koordinasi dengan BPKAD dan Bappeda	-
2	Pengadaan Aset	Pembelian langsung, hibah, pembangunan atau pengadaan berbasis proyek	-
3	Penerimaan, pencatatan, dan inventarisasi	Penerimaan aset oleh dinsos, pencatatan, inventarisasi berkala, dan pembuatan kode dan labelisasi	-
4	Penggunaan dan pemanfaatan	Penyewaan, kerjasama pemanfaatan, dan pinjam pakai	-
5	Pemeliharaan dan pengamanan aset	Perawatan rutin, pemeriksaan berkala, pengamanan, dan koordinasi dengan Inspektorat dan Satpol-PP	-
6	Penilaian aset	Dilakukan untuk mengetahui nilai wajar aset	-
7	Penghapusan aset	Jika aset sudah tidak dapat digunakan atau tidak memiliki nilai ekonomis lagi	-
8	Pemindahtanganan aset	Penjualan, tukar menukar, dan hibah ke lembaga sosial	-
9	Pengawasan dan audit	Pemeriksaan berkala dan evaluasi kepatuhan	-

Berdasarkan Program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Dinas Sosial telah melakukan beberapa tahapan dalam rangka pencapaian sasaran strategis II IK III.

3. Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS III

Meningkatnya
Pemberdayaan PMKS

Indikator kinerja meningkatnya pemberdayaan PMKS dapat dilihat melalui berbagai aspek, seperti akses terhadap layanan sosial, partisipasi aktif dalam program pemberdayaan, kemandirian ekonomi, dan penurunan ketergantungan pada bantuan sosial. Keberhasilan pemberdayaan PMKS juga dapat diukur melalui peningkatan kualitas hidup, partisipasi sosial, dan akses terhadap jaringan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Semua indikator ini menunjukkan bahwa pemberdayaan PMKS tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan sumber daya untuk hidup mandiri dan sejahtera.

a. Indikator kinerja Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya.

Pencapaian indikator kinerja ini dihitung dengan cara membandingkan antara Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan jumlah keluarga miskin, indikator ini dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Keluarga miskin yang diberi bantuan}}{\sum \text{Keluarga Miskin Tahun } - n} \times 100\%$$

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya, capaian kinerja yang telah didapat oleh Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu 100%, yang sesuai skala pengukuran ordinal maka indikator kinerja Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya termasuk kategori "**Sangat Berhasil**".

◆ **Analisis penyebab keberhasilan dan alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis III disebabkan karena Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah melakukan kegiatan bantuan sosial kesejahteraan sosial berupa pemberian bantuan benih babi sebanyak 90 ekor kepada Kelompok Adat Terpencil (KAT).







Tabel 3. 32 Penyebab kegagalan dan kendala yang dihadapi

NO.	URAIAN	KENDALA	LANGKAH SELANJUTNYA
1.	Keluarga Miskin yang meningkat kualitas hidupnya	-	-

Berdasarkan hasil perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja di atas, Dinas Sosial mendapatkan capaian kinerja 100% termasuk dalam kategori "**Sangat Berhasil**".

◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Sosial dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, memiliki 36 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo membutuhkan 40 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis III sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 9 (sembilan) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 5 (lima) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis III, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar Rp0,- dan terealisasi sebesar Rp0,-. Adapun rincian anggaran yang mendukung indikator kinerja Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya adalah sebagai berikut:

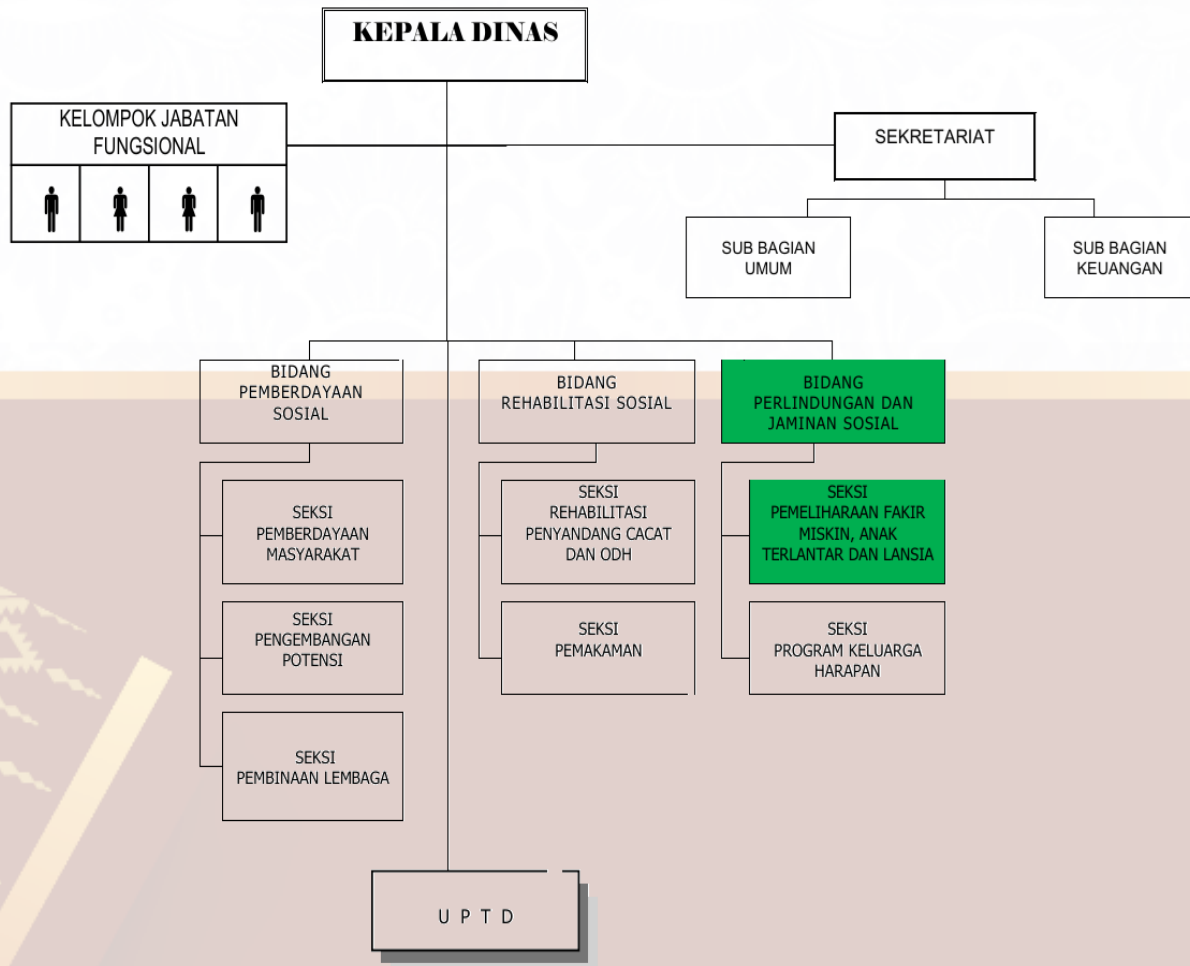
Tabel 3. 33 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis III IK I

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp0,-	Rp0,-	Rp0,-	-

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indikator kinerja persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya adalah Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan seksi pendukungnya yaitu seksi pemeliharaan fakir miskin, anak terlantar & lansia



Gambar 3. 5. Penanggungjawab Sasaran Strategis III IK I Sesuai Prosedur Kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Material*), Dinas Sosial memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis III IK I yaitu:



Tabel 3. 34 Bahan Kerja Sasaran Strategis III IK I

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	Perpres No. 186 tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial terhadap kounitas adat terpencil (KAT)	Dasar Hukum pemberdayaan KAT
2	Permensos No. 12 Tahun 2015 tentang pelaksanaan peraturan presiden nomor 186 tahun 2914	Pedoman teknis pemberdayaan sosial terhadap KAT
3	Keppres. No. 111 tahun 1999 tentang pembinaan kesejahteraan sosial KAT	Petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan sosial bagi KAT

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis III Indikator Kinerja I, kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Sosial untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.



Tabel 3. 35 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi terkait penyusunan rencana kerja dan integrasi program untuk pemberdayaan KAT	<i>Sudah dilaksanakan</i>
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Koordinasi terkait pemberdayaan dan pembangunan desa	<i>Belum dilaksanakan</i>
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi terkait pengelolaan anggaran pemberdayaan KAT	<i>Sudah dilaksanakan</i>
4	Inspektorat	Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan	<i>Sudah dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Sosial sudah sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan pemberdayaan PMKS dengan indicator kinerja persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya.

◆ Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan;

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Sosial tidak memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	-	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	Tidak Menunjang

Dinas Sosial kabupaten yahukimo telah melaksanakan kegiatan walaupun tidak ditunjang dengan program/ kegiatan yang tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dengan melalui beberapa tahap berdasarkan Perpres No. 186 tahun 2014 dan Permensos No. 12 Tahun 2015:

1. Identifikasi dan Pendataan;
2. Perencanaan program pemberdayaan;
3. Pelaksanaan pemberdayaan;
4. Evaluasi dan monitoring;
5. Kemandirian dan *Exit Strategy*.



Tabel 3. 37 Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Identifikasi dan pendataan	Survei awal, pendataan, dan penetapan KAT	-
2	Perencanaan program pemberdayaan	Penyusunan RAP, penentuan program prioritas, dan koordinasi lintas sektor	-
3	Pelaksanaan pemberdayaan	Peningkatan akses layanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, penguatan budaya dan identitas adat dan pendampingan sosial	-
4	Evaluasi dan monitoring	Pemantauan rutin dan evaluasi program	-
5	Kemandirian dan <i>Exit Strategy</i>	Pendampingan berkelanjutan jika diperlukan	-

Berdasarkan Program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Dinas Sosial telah melakukan beberapa tahapan dalam rangka pencapaian sasaran strategis III IK I.



b. Indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas yang mandiri;

Pencapaian indikator kinerja ini dihitung dengan cara membandingkan antara Jumlah penyandang disabilitas yang mandiri dan jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Yahukimo, indikator ini dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Penyandang disabilitas yang mandiri}}{\sum \text{Penyandang Disabilitas di kab. yahukimo}} \times 100\%$$

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase penyandang disabilitas yang mandiri yang telah didapat oleh Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu 0%, sehingga berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk didalam kategori "**Kurang Berhasil**".

◆ Analisis penyebab kegagalan dan alternative solusi yang telah dilakukan;

Kegagalan atas sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan PMKS dengan indicator kinerja Persentase penyandang disabilitas yang mandiri disebabkan karena beberapa hal yang tidak dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yaitu:

1. Data penyandang disabilitas yang belum ada;
2. Belum tersedianya program pemberdayaan yang sesuai kebutuhan;
3. Belum dilaksanakannya pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan bagi penyandang disabilitas;

4. Ketersediaan aksesibilitas dan sarana pendukung yang belum tersedia bagi PMKS;
5. Belum adanya kegiatan pendampingan sosial dan pembinaan yang berkelanjutan bagi PMKS;
6. Kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan yang belum dilaksanakan;
7. Belum adanya ketersediaan anggaran dan keberlanjutan program;

Tabel 3. 38 Penyebab Kegagalan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEGAGALAN
1.	Pemberdayaan PMKS	Tidak terlaksananya kegiatan terkait penyandang disabilitas

◆ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Sosial dalam pencapaian indicator kinerja tersebut, memiliki 36 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo membutuhkan 40 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis III sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 9 (sembilan) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 5 (lima) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam

pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis III, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar Rp0 dan terealisasi sebesar Rp0 atau jika dipresentasikan maka sebesar 0%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indicator kinerja Persentase penyandang disabilitas yang mandiri adalah sebagai berikut:

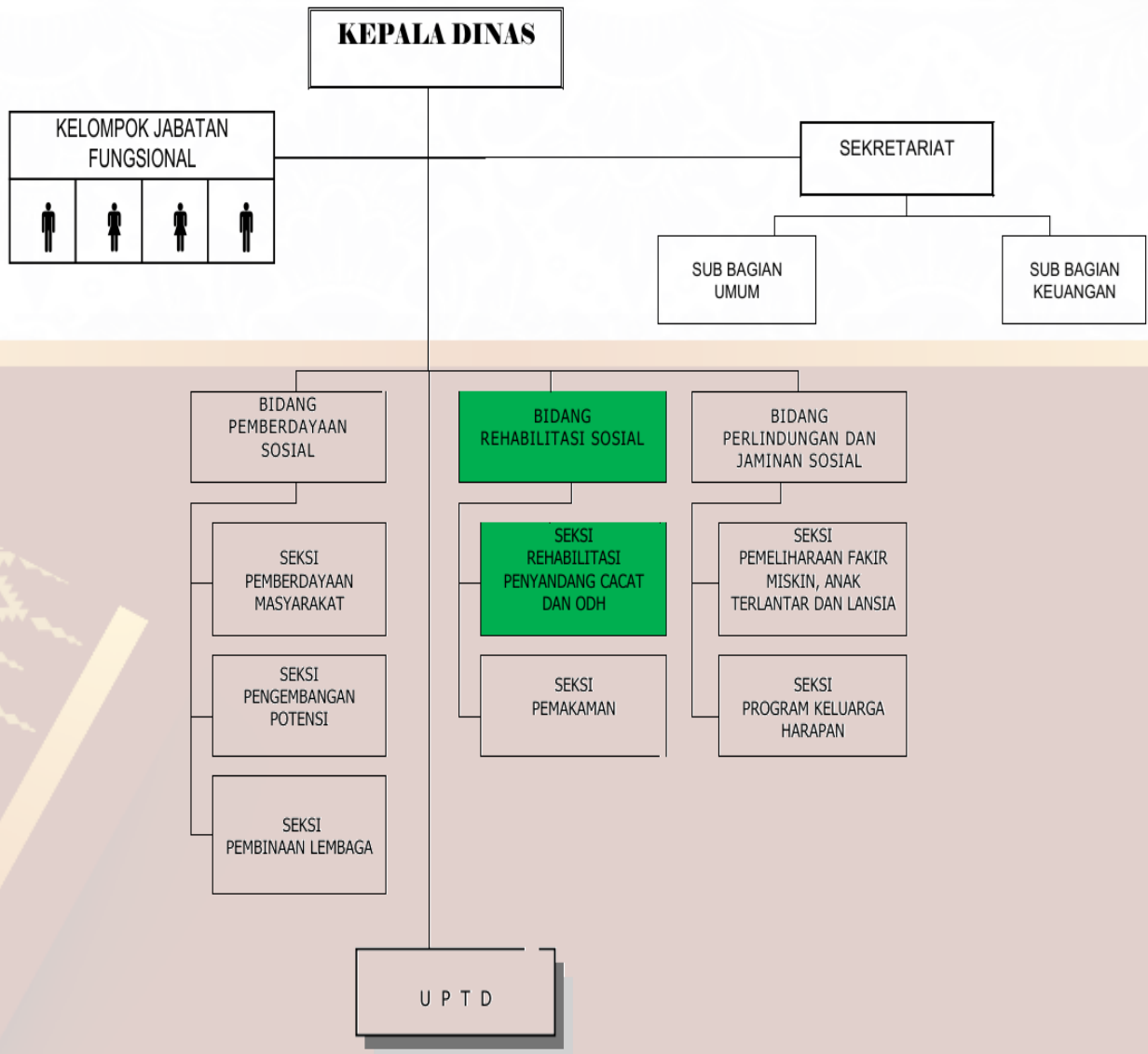
Tabel 3. 39 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis III IK II

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp0	Rp0	Rp0	0%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indicator kinerja Persentase penyandang disabilitas yang mandiri adalah Bidang Rehabilitasi Sosial dengan seksi pendukungnya yaitu Seksi rehabilitasi penyandang cacat dan ODH.



Gambar 3. 6. Penanggungjawab Sasaran Strategis III IK II Sesuai Prosedur Kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Material*), Dinas Sosial memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis III IK II yaitu:

Tabel 3. 40 Bahan Kerja Sasaran Strategis III IK II

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas	Pedoman dasar mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
2	UU No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas	Meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas
3	PP No. 52 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas	Pedoman penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4	Perpres No. 67 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	Petunjuk teknis syarat dan tata cara pemberian penghargaan bagi individu atau institusi yang berkontribusi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis III kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Sosial untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.



Tabel 3. 41 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan	Koordinasi mengenai akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas	<i>Belum dilaksanakan</i>
2	Dinas Kesehatan	Koordinasi terkait penyediaan layanan kesehatan yang ramah disabilitas	<i>Belum dilaksanakan</i>
3	Dinas Tenaga Kerja	Koordinasi dan konsolidasi untuk membantu penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses ke dunia kerja	<i>Belum dilaksanakan</i>
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi terkait dukungan penyandang disabilitas perempuan dan anak	<i>Belum dilaksanakan</i>
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinasi dalam menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas	<i>Belum dilaksanakan</i>
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dalam perancangan kebijakan dan anggaran pemberdayaan penyandang disabilitas	<i>Belum dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Sosial tidak menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dengan indicator kinerja persentase penyandang disabilitas yang mandiri.

◆ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Sosial tidak memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sehingga menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis.

Tabel 3. 42 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
-	-	-	<i>Tidak Menunjang</i>

c. Indikator Kinerja Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku;

Pencapaian indicator kinerja ini dihitung dengan cara membandingkan antara Jumlah PMKS yang mengalami perubahan perilaku dan jumlah PMKS yang diberi pelayanan di kabupaten Yahukimo, indikator ini dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{PMKS yang mengalami perubahan perilaku}}{\sum \text{PMKS yang diberi pelayanan}} \times 100\%$$

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase penyandang disabilitas yang mandiri yang telah didapat oleh Dinas Sosial

Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu 0%, sehingga berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk didalam kategori "**Kurang Berhasil**".

◆ **Analisis penyebab kegagalan dan alternative solusi yang telah dilakukan;**

Kegagalan atas sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan PMKS dengan indicator kinerja Persentase PMKS yang mengalami perubahan, yaitu:

1. Pendataan PMKS yang belum optimal dilaksanakan;
2. Belum tepatnya intervensi sesuai kenis permasalahan sosial;
3. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan program pemberdayaan;
4. Belum dilaksanakannya pendampingan dan pembinaan berkelanjutan bagi PMKS;
5. Belum adanya sinergi lintas sektor dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Tabel 3. 43 Penyebab Kegagalan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEGAGALAN
1.	Pemberdayaan PMKS	Tidak terlaksananya kegiatan terkait pemberdayaan PMKS

◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Sosial dalam pencapaian indicator kinerja tersebut, memiliki 36 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai

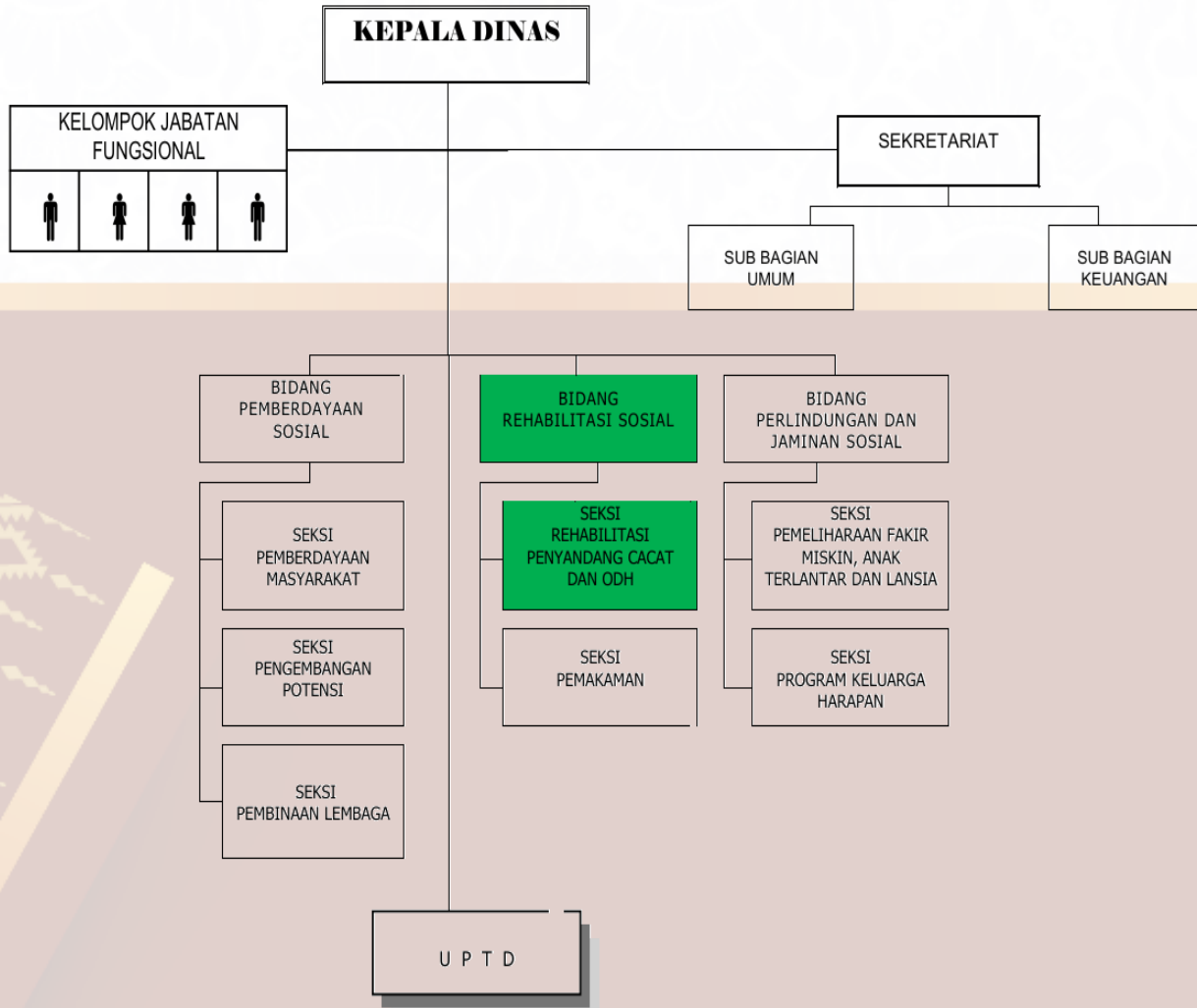
sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo membutuhkan 40 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis III Indikator kinerja III sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 8 (delapan) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 6 (enam) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis III, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar Rp0 dan terealisasi sebesar Rp0 atau jika dipresentasikan maka sebesar 0%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas yang mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 44 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis III IK III

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp0	Rp0	Rp0	0%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indicator kinerja Persentase penyandang disabilitas yang mandiri adalah Bidang Rehabilitasi Sosial dengan seksi pendukungnya yaitu Seksi rehabilitasi penyandang cacat dan ODH.

Gambar 3. 7. Penanggungjawab Sasaran Strategis III IK II Sesuai Prosedur Kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Material*), Dinas Sosial memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis III IK III yaitu:

Tabel 3. 45 Bahan Kerja Sasaran Strategis III IK III

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas	Pedoman dasar mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
2	UU No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas	Meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas
3	PP No. 52 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas	Pedoman penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4	Perpres No. 67 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	Petunjuk teknis syarat dan tata cara pemberian penghargaan bagi individu atau institusi yang berkontribusi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis III kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Sosial untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.



Tabel 3. 46 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan bagi PMKS	<i>Belum dilaksanakan</i>
2	Dinas Pendidikan	Penyediaan Layanan Pendidikan bagi PMKS	<i>Belum dilaksanakan</i>
3	Dinas Tenaga Kerja	Pemberian Pelatihan dan penyaluran kerja bagi PMKS	<i>Belum dilaksanakan</i>
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi terkait dukungan PMKS perempuan dan anak	<i>Belum dilaksanakan</i>
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinasi dalam menciptakan lingkungan yang ramah PMKS	<i>Belum dilaksanakan</i>
6	Bappeda	Koordinasi terkait perencanaan pemberdayaan PMKS	<i>Belum dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Sosial tidak menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dengan indicator kinerja persentase penyandang disabilitas yang mandiri.

◆ Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Sosial tidak memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 47 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	-	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	Tidak Menunjang

d. Indikator Kinerja Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Pencapaian indicator kinerja ini dihitung dengan cara membandingkan antara Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial dan jumlah PSKS di kabupaten Yahukimo, indikator ini dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan KS}}{\sum \text{PSKS di Kab. Yahukimo}} \times 100\%$$

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang telah didapat oleh Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu

0%, sehingga berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk didalam kategori "**Kurang Berhasil**".

♦ **Analisis penyebab kegagalan dan alternative solusi yang telah dilakukan;**

Kegagalan atas sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan PMKS dengan indicator kinerja Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial, terjadi karena tidak dilakukannya langkah-langkah sebagai berikut:

Survei dan Wawancara: Melakukan survei atau wawancara terhadap PSKS untuk menilai tingkat partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan sosial atau pemberdayaan yang ada.

Data Kegiatan: Mengumpulkan data tentang keterlibatan PSKS dalam kegiatan sosial, seperti pelatihan, kelompok usaha bersama, kegiatan relawan, atau program pendidikan.

Evaluasi Program: Menilai dampak program pemberdayaan atau kegiatan sosial terhadap PSKS, termasuk perubahan perilaku mereka, peningkatan pendapatan, atau akses lebih baik ke layanan sosial.

Tabel 3. 48 Penyebab Kegagalan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEGAGALAN
1.	PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan KS	Tidak terlaksananya langkah-langkah dalam peningkatan partisipasi PSKS dalam peningkatan KS yang dilakukan oleh Dinsos

◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

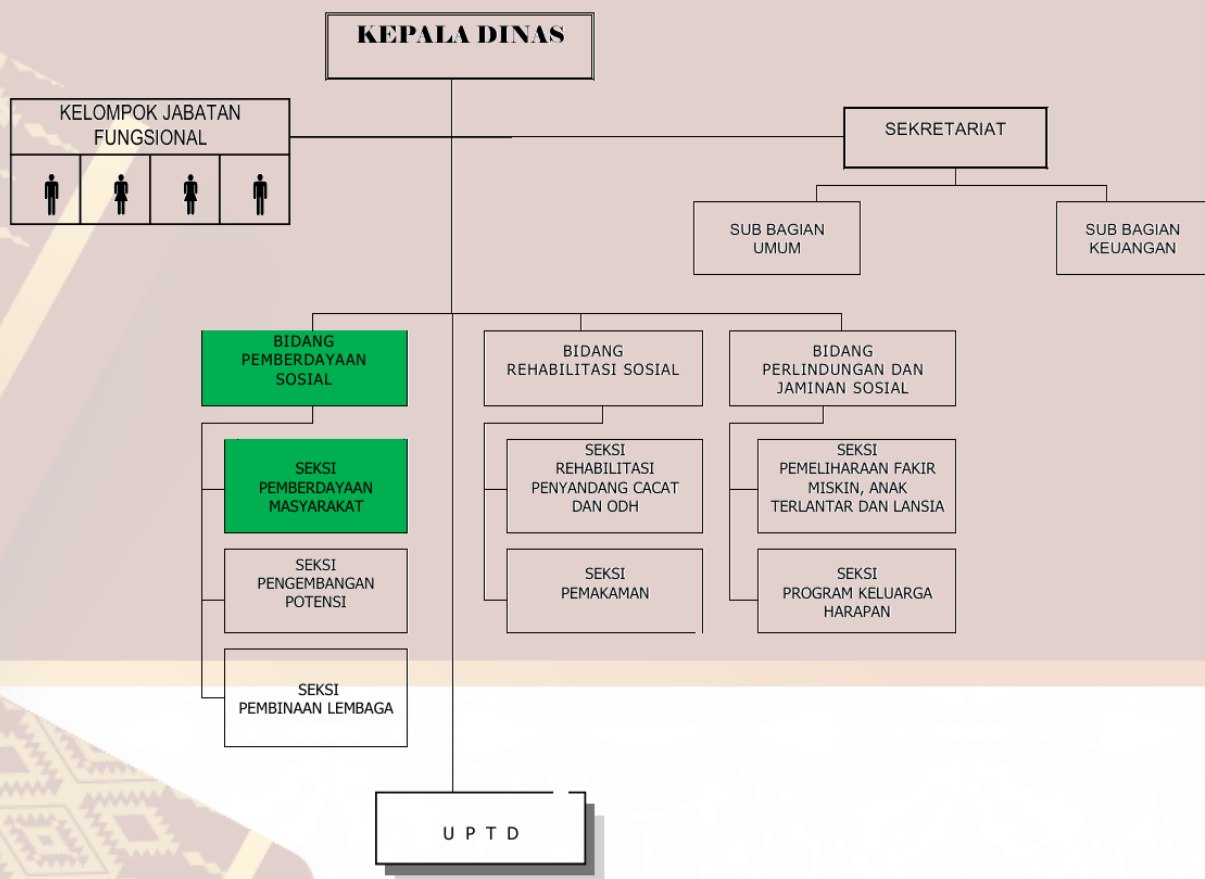
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Sosial dalam pencapaian indicator kinerja tersebut, memiliki 36 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo membutuhkan 40 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis III Indikator kinerja IV sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 5 (lima) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 2 (dua) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis III, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar Rp0 dan terealisasi sebesar Rp0 atau jika dipersentasekan maka sebesar 0%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indicator kinerja Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 49 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis III IK IV

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp0	Rp0	Rp0	0%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indicator kinerja Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial adalah Bidang Pemberdayaan Sosial dengan seksi pendukungnya yaitu Seksi Pembinaan Lembaga.

Gambar 3. 8. Penanggungjawab Sasaran Strategis III IK IV Sesuai Prosedur Kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Material*),

Dinas Sosial memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis III IK IV yaitu:

Tabel 3. 50 Bahan Kerja Sasaran Strategis III IK IV

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas	Pedoman dasar mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
2	UU No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas	Meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas
3	PP No. 52 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas	Pedoman penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4	Perpres No. 67 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	Petunjuk teknis syarat dan tata cara pemberian penghargaan bagi individu atau institusi yang berkontribusi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis III kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Sosial untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.



Tabel 3. 51 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan bagi PSKS	<i>Belum dilaksanakan</i>
2	Dinas Pendidikan	Penyediaan Layanan Pendidikan bagi PSKS	<i>Belum dilaksanakan</i>
3	Dinas Tenaga Kerja	Pemberian Pelatihan dan penyaluran kerja bagi PSKS	<i>Belum dilaksanakan</i>
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi terkait dukungan PSKS perempuan dan anak	<i>Belum dilaksanakan</i>
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinasi dalam menciptakan lingkungan yang ramah PSKS	<i>Belum dilaksanakan</i>
6	Bappeda	Koordinasi terkait perencanaan pemberdayaan PSKS	<i>Belum dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Sosial tidak menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dengan indicator kinerja persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

◆ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Sosial tidak memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 52 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
-	-	-	-

Dinas Sosial kabupaten yahukimo tidak melaksanakan kegiatan yang telah tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pemberdayaan PSKS.



4. Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS IV

Meningkatnya Hak Hidup
Dasar Lansia

Sasaran strategis “Meningkatnya hak hidup dasar lansia” mengandung makna bahwa pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang menangani urusan sosial, berupaya memastikan bahwa lanjut usia, terutama lansia terlantar atau rentan, dapat terpenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak, aman, dan bermartabat. Hak hidup dasar lansia tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan untuk tetap hidup, tetapi juga mencakup pemenuhan aspek-aspek dasar yang memungkinkan lansia menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih manusiawi.

Dengan demikian, sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap lansia agar mereka tidak mengalami keterlantaran, pengabaian, maupun kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



a. Indikator Kinerja Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia.

Indikator kinerja “Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia” digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah menyelenggarakan berbagai aspek pendukung terwujudnya daerah yang ramah terhadap lanjut usia. Indikator ini mencakup penyelenggaraan kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada lansia, pelayanan sosial dan kesehatan, penyediaan lingkungan dan fasilitas umum yang ramah lansia, dukungan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan dan partisipasi lansia, perlindungan terhadap lansia rentan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Semakin luas ruang lingkup yang telah dilaksanakan, maka semakin baik komitmen dan kapasitas daerah dalam menjamin hak hidup dasar lansia secara layak, aman, dan bermartabat.

Pencapaian indikator kinerja ini dihitung dengan cara menjumlahkan Kota Ramah Lansia, indikator ini dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

∑ Kota Ramah Lansia

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja ruang lingkup penyelenggaraan kota ramah lansia yang telah didapat oleh Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu 0%, sehingga berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk didalam kategori “**Kurang Berhasil**”.

◆ **Analisis penyebab kegagalan dan alternative solusi yang telah dilakukan;**

Kegagalan atas sasaran strategis meningkatnya hak hidup dasar lansia dengan indicator kinerja Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Belum optimalnya pendataan dan pemutakhiran data lansia rentan/ terlantar;
2. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan sosial bagi lansia;
3. Program dan intervensi ansia masih bersifat terbatas dan belum berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pendampingan sosial dan pembinaan terhadap lansia;
5. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM pelaksana di bidang kesejahteraan sosial lansia;
6. Belum optimalnya fasilitasi peran keluarga dan masyarakat dalam perlindungan lansia;
7. Belum kuatnya fungsi koordinatif dinas sosial sebagai penggerak isu lansia;
8. Keterbatasan dukungan anggaran program kesejahteraan sosial lansia;
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap kondisi lansia penerima layanan;
10. Kondisi geografis dan keterjangkauan pelayanan sosial yang masih terbatas

Tabel 3. 53 Penyebab Kegagalan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEGAGALAN
1.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	Tidak terlaksananya kegiatan terkait Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia

◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

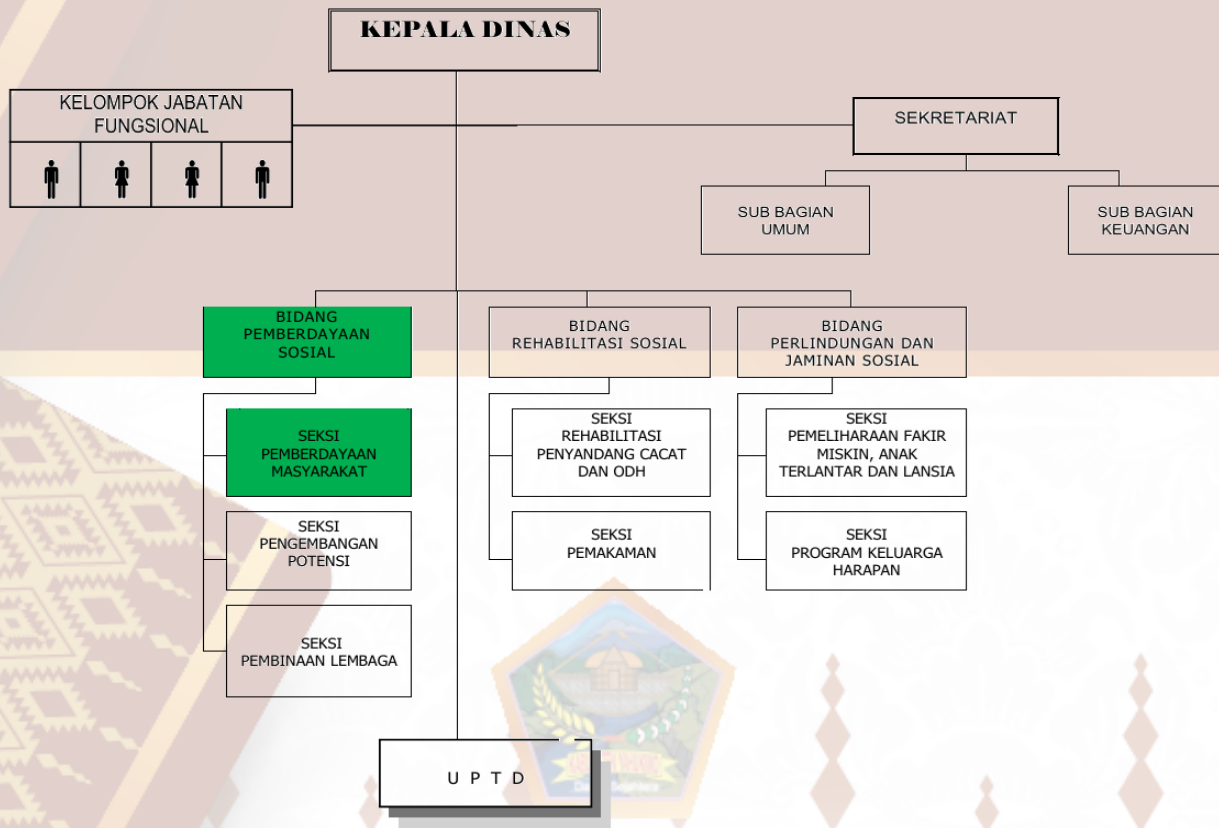
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Sosial dalam pencapaian indicator kinerja tersebut, memiliki 36 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo membutuhkan 40 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis IV sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 5 (lima) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 3 (tiga) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis IV, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar Rp0 dan terealisasi sebesar Rp0 atau jika dipresentasikan maka sebesar 0%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indicator kinerja Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 54 Anggaran yang mendukung Sasaran strategis IV

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp0	Rp0	Rp0	0%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indicator kinerja Persentase penyandang disabilitas yang mandiri adalah Bidang Pemberdayaan sosial dengan seksi pendukungnya yaitu Seksi pemberdayaan masyarakat.

Gambar 3. 9. Penanggungjawab Sasaran Strategis IV Sesuai Prosedur Kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Materia*), Dinas Sosial memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis IV yaitu:

Tabel 3. 55 Bahan Kerja Sasaran Strategis IV

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Aturan Dasar kesejahteraan lansia
2	PP No. 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia	Petunjuk teknis dalam peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia
3	Permensos No. 4 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia	Pedoman dalam mengembangkan kawasan yang ramah bagi lansia

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis IV kolaborasi antara Dinas Sosial dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Sosial untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 3. 56 Lintas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Lansia	<i>Belum dilaksanakan</i>
3	Dinas Tenaga Kerja	Koordinasi terkait pemberdayaan lansia melalui pelatihan dan keterlibatan dalam kelompok usaha bersama (KUBE)	<i>Belum dilaksanakan</i>
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi terkait pengelolaan program seperti posyandu lansia untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan lansia	<i>Belum dilaksanakan</i>
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Konsolidasi dalam mengedukasi masyarakat dan perangkat daerah untuk bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait lansia	<i>Belum dilaksanakan</i>
6	Bappeda	Koordinasi terkait pemetaan dan profiling lansia untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran	<i>Belum dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Sosial tidak menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya hak hidup dasar lansia dengan indicator kinerja ruang lingkup penyelenggaraan kota ramah lansia.

◆ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Sosial tidak memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 57 Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
-	-	-	-

Dinas Sosial kabupaten yahukimo tidak melaksanakan kegiatan yang belum tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

B. REALISASI ANGGARAN DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial didukung oleh dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo khususnya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial tahun anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp2.559.829.590 namun setelah perubahan anggaran, nilai tersebut menjadi Rp2.559.829.590 dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp Rp2.559.829.590 atau jika dipersentasekan sebesar 100%, yang terbagi dalam 2 (dua) Program dan 4 (empat) Kegiatan.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran dengan mengacu pada formulasi capaian maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100$$

Tabel 3. 58 Skala Pengukuran Efektivitas Anggaran

No	Jumlah Nilai	Kategori	Interpretasi
1.	>100%	Sangat Efektif	Kinerja lebih tinggi dibanding anggaran yang digunakan (efisiensi tinggi)
2.	90% - 100%	Efektif	Kinerja sesuai dengan anggaran yang dialokasikan
3.	80% - 89%	Cukup Efektif	Masih dalam batas wajar, tetapi perlu optimalisasi
4.	60% - 79%	Kurang Efektif	Anggaran tidak terserap secara optimal, perlu evaluasi mendalam
5.	<60%	Tidak Efektif	Banyak anggaran yang tidak terserap atau kinerja sangat rendah

Berikut rincian realisasi fisik dan keuangan per-program dan kegiatan beserta capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja serta efektifitas anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja (%)	Efektivitas Anggaran
					Rp.	%		
1	Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/ kota Sub Kegiatan : Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	2.500.000.000	2.500.000.000	100	100	100%
		Persentase Tagana Aktif	-	0	0	0	0	0%
2	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	35.686.040	35.686.040	100	Belum Dievaluasi	Belum Ada
		Persentase menurunnya temuan material	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.963.550	16.963.550	100	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja (%)	Efektivitas Anggaran
					Rp.	%		
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		Persentase aset kondisi baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.180.000	7.180.000	100	100	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	-	-	-	-	100%	100%
		Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	-	-	-	-	0%	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja (%)	Efektivitas Anggaran
					Rp.	%		
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	-	-	-	-	0%	0%
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	-	-	-	-	0	0%
4	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	-	-	-	-	0	0%

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran serta tingkat efektifitas anggaran diatas, dan mengacu pada pengukuran skala ordinal maka tingkat efektivitas penggunaan anggaran oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 60 Efektivitas Anggaran Dinas Sosial Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT EFEKTIFITAS ANGGARAN	KATEGORI	REKOMENDASI
1	Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	Sangat Efektif	Kinerja sesuai dengan anggaran yang dialokasikan
		Persentase Tagana Aktif	0%	Tidak Efektif	Perlu Adanya Evaluasi lebih lanjut
2	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
		Persentase menurunnya temuan material	N/A	N/A	N/A
		Persentase aset kondisi baik	100%	Sangat Efektif	Kinerja sesuai dengan anggaran yang dialokasikan
3	Meningkatnya Pemberdayaan PMKS	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	100%	Sangat Efektif	Kinerja sesuai dengan anggaran yang dialokasikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT EFEKTIFITAS ANGGARAN	KATEGORI	REKOMENDASI
		Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	0%	Tidak Efektif	Perlu Adanya Evaluasi lebih lanjut
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	0%	Tidak Efektif	Perlu Adanya Evaluasi lebih lanjut
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	0%	Tidak Efektif	Perlu Adanya Evaluasi lebih lanjut
4	Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia	0%	Tidak Efektif	Perlu Adanya Evaluasi lebih lanjut

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Bupati Yahukimo dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021-2026. Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun anggaran 2025, Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berusaha dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan sehingga mencapai kinerja yang cukup baik, terutama dalam rangka merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan dalam perjanjian kinerja. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan atas 4 (empat) sasaran strategis, yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial dengan capaian kinerja 50,00% (**Gagal**);
2. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel dengan capaian kinerja 100% (**Berhasil**);
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dengan capaian kinerja 33,33% (**Gagal**);
4. Sasaran Strategis Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia dengan capaian kinerja 0% (**Gagal**);

Tingkat kegagalan atas 3 (tiga) sasaran strategis dan 1 (satu) keberhasilan adalah **45,96% (Kurang Berhasil)**. Begitu juga dilihat dari segi anggaran untuk melaksanakan 6 (enam) sasaran strategis tersebut, telah dianggarkan sebesar Rp2.559.829.590 dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.559.829.590 atau 100%.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan kurang baik sesuai target yang telah ditetapkan, dengan kegagalan untuk 3 (tiga) sasaran dan keberhasilan atas 1 (satu) sasaran dari sasaran strategis, dengan pemahaman yang masih belum memadai Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo tetap berusaha mengejar ketertinggalan walaupun Laporan kinerja yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna. Begitu juga bahwa selama tahun 2025 ini disadari banyak ditemui hambatan/ permasalahan yang harus dibenahi di masa yang akan datang antara lain:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Perlunya transparansi atasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada bawahan;
3. Perlunya pemberian pemahaman oleh pimpinan instansi kepada bawahan terkait tugas pokok dan fungsi, agar tidak terjadi penyelewengan tugas pokok dan fungsi antara bidang-bidang maupun seksi-seksi dan sub bagian;
4. Perlunya komitmen di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dalam menyikapi regulasi yang menjadi prioritas visi dan misi Bupati Yahukimo;
5. Perlunya sosialisasi kembali terhadap penguatan Reformasi Birokrasi dan SAKIP kepada aparatur Dinas Sosial dilingkungan pemerintah Kabupaten Yahukimo;
6. Peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi dalam mencapai target kinerja;
7. Memberi perhatian terhadap kegiatan pelayanan publik yang belum didukung oleh kegiatan dan penganggaran yang merupakan indikator kinerja dari Dinas Sosial dengan target yang sudah ditetapkan;
8. Menyusun jadwal penyerapan program dan kegiatan agar dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan target kinerja dan tepat waktu;
9. Meningkatkan kerjasama dan evaluasi antara pimpinan instansi dan Bidang-bidang dilingkungan Dinas Sosial untuk memberikan solusi atas kekurangan dan keterlambatan dalam mencapai target kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 disampaikan dengan harapan dapat memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo kepada Bupati Yahukimo dan juga kepada

Publik (stakeholders) sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Sumohai, 25 Februari 2026


Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Yahukimo

UNTIKON KENANGALEM, SH. M.Si
PEMBINA IV/a
NIP. 198308162010041004



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**